

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

Penerbit :



MEDIA KARYA
publishing

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

ISBN : 978-602-50529-6-5

Penulis : Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si

Editor : Dr. Abd Aziz Hsb, M.Pd.

Layout : Mujang Kurnia

Desain Sampul : Tim Media Karya

Diterbitkan di Indonesia oleh
Penerbit Media Karya Publishing, Banten

Cetakan ke 2, Agustus 2020

CV. Media Karya Kreatif
Kota Serang, Banten - Indonesia
Email : mediakarya.publishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dasas yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan penerusnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa terbitnya buku dasas ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Rektor IAIN "SMH" Banten, Segenap pimpinan, LP2M dan Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN "SMH" Banten yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis karya ini.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada semua orang yang sudah memberikan bantuan, dukungan dan doa bagi penulisan buku dasas ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Semoga apa yang tertulis dalam buku dasas ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Serang, Maret 2019

Nihayatul Masykuroh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I SISTEM EKONOMI DAN POLITIK EKONOMI.....	1
• Pengertian Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi.....	1
• Ruang Lingkup Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi.....	10
• Macam-macam Sistem Ekonomi.....	11
• Dasar Hukum Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi...	22
BAB II SISTEM EKONOMI KAPITALIS.....	31
• Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme.....	31
• Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kapitalisme.....	36
• Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis.....	56
• Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis.....	58
• Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis.....	59
• Individualisme Asas Kapitalisme.....	61
• Negara Penganut Sistem Ekonomi Liberal.....	63
BAB III SISTEM EKONOMI SOSIALIS.....	65
• Sejarah Timbulnya Gerakan Sosialis.....	65
• Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis.....	69
• Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis.....	70
• Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis.....	71
• Sosialisme Menolak Hak Individu.....	72

BAB IV SISTEM EKONOMI CAMPURAN.....	75
• Definisi Sistem Ekonomi Campuran dan Ideologi Politiknya.....	75
• Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran.....	75
• Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran.....	76
• Sejarah Sistem Ekonomi Campuran.....	76
• Negara Penganut Sistem Ekonomi Campuran.....	80
• Kelebihan dan Kekurangan dari Sistem Ekonomi Campuran.....	81
 BAB V SISTEM EKONOMI ISLAM.....	 83
• Pengertian Ekonomi Islam.....	83
• Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam.....	92
• Sistem Ekonomi menurut Islam.....	99
 BAB VI KONSUMSI, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM SISTEM EKONOMI.....	 101
• Intervensi Pemerintah.....	121
• Regulasi Harga dan Pasar.....	123
• Peranan Lembaga Hisbah.....	126
• Perencanaan Ekonomi.....	134
 BAB VII PERDAGANGAN BEBAS DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI.....	 139
• Sejarah Sistem Pasar Bebas (Kerangka Teoritis).....	142
• Pertumbuhan Ekonomi dan Depresi Hebat (<i>The Great Depressions</i>) 1930.....	147
• Ketimpangan dalam Sistem Pasar Bebas.....	149
 DAFTAR PUSTAKA.....	 161
BIODATA PENULIS.....	169

BAB I

SISTEM EKONOMI DAN POLITIK EKONOMI

Pengertian Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi

Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi.¹ Pembelajaran Ilmu Ekonomi Politik merupakan pembelajaran ilmu yang bersifat interdisiplin, yakni terdiri atas gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik.²

Ilmu ini mengkaji dua jenis ilmu yakni ilmu politik dan ilmu ekonomi yang digabungkan menjadi satu kajian ilmu ekonomi politik.³ Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi.⁴

Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik; yakni menyoroti interaksi antara faktor-

¹ Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

² Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

³ Donald Rothchild dan Robert L. Curry, *Scarcity, Choice, and Public Policy in Middle Africa*, University of California Press, Berkeley, 1989, h. 13

⁴ Donald Rothchild dan Robert L. Curry, *Scarcity, Choice, and Public Policy in Middle Africa*, h. 13

faktor ekonomi dan faktor-faktor politik.⁵ Namun dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.⁶

Adanya kelemahan instrumen ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik.⁷ Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan.⁸

Pengertian ekonomi politik dapat juga dalam konteks sistem. Sebelum diuraikan apakah yang dimaksud ekonomi politik sebagai suatu sistem, kiranya lebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri. Secara ringkas yang dimaksud dengan sistem adalah serangkaian unit dari suatu lembaga yang bersifat saling terkait dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan suatu asas tertentu.⁹

Dengan demikian, ekonomi politik sebagai suatu sistem mengandung arti adanya tatanan ekonomi politik yang dibangun di atas asas yang khas dengan unit-unit yang saling

⁵ Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

⁶ Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

⁷ Martin Staniland, "Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan", Terj, Jakarta. Rajawali, 2003

⁸ Lane, Jane Erik et al, "ekonomi Politik Komparatif", terj, Jakarta; Raja grafindo Persada, 1994

⁹ Dumairy, "perekonomian Indonesia", Penerbit erlangga, Jakarta, 1996; 30

terhubung dan terpadu sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, identifikasi perbedaan terhadap suatu ekonomi politik dapat dikenali dari sistem yang dibangun, mulai dari cara dan mekanismenya, asas dan tujuannya.

Berdasarkan hal itu, maka secara mudah dapat dikenali jenis-jenis ekonomi politik melalui identifikasi tujuan, cara dan asasnya: apakah ekonomi politik tersebut bersifat kapitalis atau sosialis. Demikian pun dapat pula diidentifikasi apa yang dimaksud dengan ekonomi politik Islam.

Sebagaimana yang sudah sangat populer diketahui, istilah “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikosnomos*” atau “*oikonomia*” yang artinya manajemen urusan rumah-tangga”, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan.¹⁰ Terdiri dari dua term kata, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”. *Oikos* berarti keluarga, rumah tangga, *nomos* artinya peraturan, aturan dan hukum.¹¹

Secara sederhana maksudnya adalah tata cara menyelenggarakan rumah tangga. Ilmu Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi terkenal mendefinisikan, Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan,

¹⁰ Scott, John *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, 2005

¹¹ Scott, John *Industrialism: A Dictionary of Sociology*

dengan cara atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat.¹²

Sebelum ilmu ekonomi berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri seperti sekarang, dulunya dikenal dengan ilmu ekonomi politik (*political economy*). Tulisan-tulisan para sarjana di abad ke-18 hingga ke-19, belum memisahkan antara ekonomi dan politik. Seiring perkembangan ilmu yang terus-menerus mengalami spesialisasi diferensiasi, maka di kemudian hari ekonomi politik dipilah menjadi ilmu ekonomi murni di satu sisi, dan ilmu politik di sisi lain.

Hal itu dapat dipahami sebagai akibat dari pengaruh modernisasi yang menuntut adanya spesialisasi dan diferensiasi di segala bidang. Adalah Alfred Marshal,¹³ pemuka mazhab neo-klasik, yang mengubah disiplin ekonomi politik menjadi ilmu ekonomi murni dengan bukunya *The Principles of Economics*. Alasan dia bahwa ilmu “baru” yang dimaksudkannya itu sudah berhenti sebagai suatu *system of inquiry* yang mempunyai kaitan langsung dengan permasalahan kebijaksanaan ekonomi pada abad ke-18 dan 19.

Tetapi Gunnar Myrdal,¹⁴ seorang sarjana yang menolak teori ekonomi konvensional dan menganggapnya terlalu teknis,

¹² Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar bebas*, Pusat Studi Ekonomi Panxasila-UGM, 2010.

¹³ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

¹⁴ Gunar Myrdal, *Economic Theory and Under Developed Regions*, Gerald Duckworth, London, 1957.

mengembalikan *system of inquiry* itu dalam penggunaan dan sejalan dengan itu istilah ekonomi-politik pun digunakan. Tapi sejak dulu hingga sekarang, istilah (ekonomi politik) secara konsisten dipakai dikalangan Marxist dan kaum sosialis juga berbagai kelompok ilmuwan ekonomi di Eropa Barat dan Eropa Timur.

Sekarang setelah gerak sejarah berbalik menuntut cara pandang yang holistik dan interdisipliner, ekonomi politik pun kembali populer dan mendapatkan tempatnya. Perbedaan utama dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat adalah given.

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pasar (ekonomi liberal) dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis).¹⁵ Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu mempengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.¹⁶

Terdapat dua pendekatan dalam Ekonomi Politik, yakni; (1). Pendekatan Pilihan Publik adalah suatu sikap individu

¹⁵ Martin Staniland, "Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan", Terj, Jakarta. Rajawali, 2003

¹⁶ Martin Staniland, "Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan", Terj, Jakarta. Rajawali, 2003

dalam menentukan pilihan mereka secara rasional.¹⁷ Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional individu di dalam institusi non-pasar.¹⁸

Namun karena sifatnya yang longitudinal,¹⁹ maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada satu negara ke negara lainnya.²⁰ (2). Pendekatan Neo-Marxis, dalam ekonomi politik, menekankan pada sifat holistik yakni analisis secara menyeluruh, mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik.²¹ Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit.²²

Pendekatan ini juga menyoroiti dan memodelkan berbagai perbedaan antar-negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat.²³

¹⁷ Lane, Jane Erik et al, "ekonomi Politik Komparatif", terj, Jakarta; Raja grafindo Persada, 1994

¹⁸ Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

¹⁹ Longitudinal adalah metode penelitian yg didasarkan pd masa tertentu yg relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu.

²⁰ Martin Staniland, "Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan", Terj, Jakarta. Rajawali , 2003

²¹ Martin Staniland, "Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan", Terj, Jakarta. Rajawali , 2003

²² Didick J.Rachbini, "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002,

²³ Arifin B. dan Didik J Rachbini, Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik, Pustaka Grasindo, Jakarta, 2001.

Menurut Ahmad Erani Yustika, ada tiga varian penting dalam pendekatan ekonomi politik. Ketiga varian itu adalah: ekonomi politik klasik/neoklasik (*classical/neoclassical political economy*), ekonomi politik Keynesian (*Keynesian political economy*), dan ekonomi politik Marxian (*Marxian political economy*). Secara singkat dijelaskan, ekonomi politik klasik atau neoklasik adalah ekonomi politik berbasis pasar atau berdasarkan kapitalisme. Sementara ekonomi politik Keynesian berinduk pada teori ekonomi J.M. Keynes yang memperkenankan intervensi negara jika perekonomian mengalami krisis. Adapun ekonomi politik Marxian yaitu perekonomian yang didorong sepenuhnya oleh negara.

Ketika gejala ekonomi dijelaskan melalui pendekatan ilmu ekonomi murni (tradisional), rupanya telah menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian kalangan karena dianggap menjelaskan masalah secara tidak lengkap. Salah seorang kritikus terhadap ekonomi konvensional, Gunnar Myrdal, menolak teori-teori ekonomi konvensional karena mengabaikan hal-hal yang fundamental dan cenderung ke arah teknis sehingga seolah-olah menjadi bebas nilai untuk tujuan mencapai apa yang disebut objektivitas. Bagi Myrdal, teori ekonomi mustahil netral, yaitu secara positif objektif.

Ilmu ekonomi, sebagaimana halnya karya John Stuart Mills,²⁴ pada dasarnya juga merupakan ilmu pengetahuan dengan nilai dan moral tertentu. Bahkan kaum neoklasik sendiri mempunyai dasar filsafat, yaitu filsafat moral utilitarian.

²⁴ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

Namun, para ekonom modern menyembunyikan dan melupakan dasar-dasarnya yang sekarang sudah menjadi filsafat moral yang beku. Dan karena itu mereka menyajikan sesuatu yang nampaknya seperti teori ekonomi yang bebas-nilai.

Perbedaan “mazhab” dalam menempatkan ilmu ekonomi, bersifat netral atau tidak, memiliki argumen dan signifikansinya masing-masing. Karena itu, menurut Lindbeck²⁵ masalahnya yang paling esensial adalah mencari jawaban alternatifnya. Dalam hal ini, ekonomi politik berjasa menyajikan pembahasan mengenai: (a) apakah sistem ekonomi harus diorganisasikan melalui pasar, melalui birokrasi politik atau bagaimana, (b) apakah sistem itu harus disentralisasikan atau didesentralisasikan dalam proses pengambilan keputusan, (c) siapa yang seharusnya memiliki modal (d) apakah cara kompetisi ataukah cara koperasi yang dipilih dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, dan (e) apakah hakekat makna pembangunan, sampai seberapa itu dikehandaki? Kelima hal di atas merupakan isu utama dalam ekonomi politik sebagai ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia di tengah sumber daya yang terbatas.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*).

Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan

²⁵ Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.²⁶

Namun dengan mengingat Machiavelli²⁷ maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya.

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik.

Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

²⁶ Arifin B. dan Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Grasindo, Jakarta, 2001

²⁷ Arief Ramelan Karseno, *Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar*, dalam *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, ed. Dr. Mohtar Mas'ood, Yogyakarta: UII Press, 1999

Ruang Lingkup Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari beberapa aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling dikenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya.²⁸

Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia.

Ada 3 hal pokok yang ada dalam perekonomian:²⁹

1. Produksi
2. Konsumsi
3. Perdagangan

Sistem Perekonomian menurut Dumairy, adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan

²⁸ Winardi, Kapitalisme Versus Sosialisme, Bandung, Remaja Karya, 1986, hlm. 38

²⁹ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

kehidupan, selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.³⁰

Macam-macam Sistem Ekonomi

a. Sistem Perekonomian Kapitalisme

Yaitu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan menjual barang dan sebagainya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba yang sebesar besarnya.

b. Sistem Perekonomian Sosialisme

Yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah.

Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c. Sistem Perekonomian Komunisme

Adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tak boleh memiliki kekayaan pribadi. Sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh

³⁰ Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.

pemerintah. Semua unit bisnis. mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan Pemerataan Ekonomi dan kebersamaan.

d. Sistem Ekonomi Merkantilisme

Yaitu suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset dan modal yang dimiliki negara.

e. Sistem Perekonomian Fasisme

Yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata lain, fasisme merupakan sikap rasionalism yang berlebihan.³¹

Adapun yang dimaksud dengan sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.³²

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada diantara dua sistem ekstrim tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (*planned economies*)

³¹ Winardi, Kapitalisme Versus Sosialisme

³² Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.

memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi.

Sementara pada perekonomian pasar (*market economic*), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.³³

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh.³⁴

Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai

³³ Edi Suharto, Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

³⁴ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.³⁵

Perekonomian pasar campuran atau *mixed market economies* adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana.³⁶ Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (*advertising*), dan lain-lain.

Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi-pengubahan status perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.³⁷

Rezim atau system politik berasal dari kata *regime* yang berarti *a form or system of government, a government power*.³⁸ Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan rezim sesungguhnya sama dengan pengertian sistem. Maka apa yang dimaksud dengan sistem politik sama artinya dengan rezim politik dan rezim ekonomi politik. Melalui pendekatan sosiologi politik, Maurice Duverger memberikan pengertian rezim politik sebagai lembaga politik yang secara hiostoris

³⁵ Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

³⁶ Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

³⁷ Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

³⁸ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain, mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri dimana kehidupan politik itu terjadi.

Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari kerangka sosial yang secara keseluruhan terdiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geografis dan demografis. Dengan demikian, rezim politik adalah sistem politik yang berlaku di suatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya yang ada di negara tersebut.

Studi sosiologi politik dari Maurice Duverger, mencoba mengklasifikasikan rezim politik menjadi,³⁹

- 1) Klasifikasi purba, yang terdiri dari monarkhi, oligarki dan demokrasi. Terkait dengan hal ini, Aristoteles membedakannya berdasarkan korup atau tidaknya suatu pemerintahan. Rezim politik berbentuk tirani, oligarkhi dan demokrasi, sedangkan bentuk pemerintahan murninya adalah monarkhi, aristokrasi dan timokrasi (demokrasi dengan pemilihan yang terbatas).
- 2) Klasifikasi hukum pada masa sekarang. Ahli hukum percaya pada praktik *Trias politica* Montesquieu. Klasifikasi rezim politik dibuat berdasarkan hubungan internal antara kekuasaan dan elemen yang berbeda yang membentuk negara. Terdiri dari tiga jenis rezim, yaitu; a) rezim dengan pemerintahan perwakilan, b) rezim dengan pemusatan kekuasaan dan c) rezim parlementer, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem parlementer dan sistem presidensial.

³⁹ Edi Suharto, *Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

- 3) Klasifikasi Sosiologi Modern. Terdiri dari dua jenis utama yaitu a) rezim pluralitas atau demokratis dimana mengizinkan tuntutan politik secara terbuka dan bebas melalui partai-partai politik secara terbuka dan bebas, dan b) rezim unitarian atau otokratis lebih menyaratkan bahwa konflik dan tuntutan politik secara resmi tidak diperkenankan.

Rezim ekonomi politik menurut Maurice Deverger⁴⁰ dapat dilihat dari dua pandangan : *Pertama*; pandangan kaum marxis yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Kepemilikan faktor produksi dikuasai oleh satu kelompok masyarakat yang disebut kaum kapitalis atau bourgeois dan kelompok yang tidak memiliki faktor produksi dan hanya menjadi bagian dari faktor produksi tersebut yaitu kaum buruh atau proletar. *Kedua*, paham liberal, yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik dalam hubungannya dengan ekonomi.

Dengan kata lain, intervensi politik terhadap kehidupan ekonomi sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Perbedaan ini selanjutnya dapat dilihat dari sistem perekonomian yang terdapat disuatu negara.

Sistem Perekonomian dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan swasta) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu

⁴⁰ Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran.⁴¹

Adapun bentuk umum dari sistem perekonomian adalah.⁴²

1. Sistem pasar bebas (*Free Enterprise Economy*) atau perekonomian pasar dengan prinsip *Laissez Faire*. Cirinya 1) pemerintah tidak campur tangan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan 2) masyarakat bebas menentukan alokasi sumberdaya, jenis pekerjaan, usaha dan jenis barang.
2. Sistem ekonomi Campuran (*Mixed economy*) dengan pengendalian dan control oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Campur tangan berupa: penetapan peraturan, sebagai pelaku ekonomi dan pelaksana kebijakan pemerintah
3. Sistem Ekonomi Perencanaan (*Central Planed*) dimana pemerintah menentukan sepenuhnya corak kegiatan ekonomi yang akan diberlakukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata: "*Oikonomike*" dan "*Polis*" yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial.

Martin Staniland mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik.⁴³

⁴¹ Edi Suharto, Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

⁴² Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996

Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain yang bersifat deterministik, atau hubungan yang bersifat imbal balik (resiprositas) atau suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus.

Robert Dahl dan Charles Lindblom dalam bukunya *Politics, Economics dan Welfare* tahun 1953 memuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yaitu :⁴⁴

1. Ada perbedaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik terutama berkaitan dengan interaksi ekonomi politik di zaman modern
2. Ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu
3. Ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan
4. Ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dari ilmu sosial lain
5. Ekonomi politik digunakan pula untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian, dan ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan,

⁴³ Martin Staniland, “Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatardelakangan”, Terj, Jakarta. Rajawali , 2003

⁴⁴ Edi Suharto, Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

pertumbuhan dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional.

Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan :

- 1) Menciptakan suatu sumber pendapatan masyarakat dan
- 2) Menyediakan daya bagi negara agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Sementara itu, Gregory dan Stuart mencoba menjelaskan keterlibatan negara dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan empat aspek. Mereka membuat suatu kerangka analisis yang membedakan sistem ekonomi politik atas empat aspek dan masing-masing aspek mengandung dua sisi.

Keempat aspek itu adalah sebagai berikut:

1. Organisasi pembuatan keputusan yang mengandung dua sisi yaitu sentralisasi dan desentralisasi
2. Penyediaan informasi dan koordinasi yang mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah
3. Hak kepemilikan yang mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang memuat unsur kepemilikan pribadi dan umum
4. Sistem insentif apakah bersifat moral atau material.

Berdasarkan kategori ini maka didapatkan kategori sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme pasar dan sosialisme terencana.

Gastil mengategorikan sistem ekonomi politik sebagai berikut:⁴⁵

1. Sistem kapitalisme dengan ciri kebebasan ekonomi seluas-luasnya, membatasi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar
2. Etatisme kapitalis, dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.
3. Kapitalisme campuran, dengan ciri dalam sistem ini pemerintah sangat aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi dan mengatur mekanisme pasar secara langsung, namun jumlah sumberdaya ekonomi tidak merampas porsi mayoritas perekonomian nasional
4. Sosialisme campuran, dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui, namun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian sehingga sistem ini sudah termasuk dalam sistem sosialis.
5. Sistem sosialis, dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi, individu sangat dibatasi bahkan tertekan.

Adapun paradigma system ekonomi politik secara garis besar terdapat empat bentuk sistem ekonomi politik yang cukup dominan yaitu Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme

⁴⁵ Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996

dan sistem ekonomi campuran. Yang secara sederhana dapat dipetakan dalam persamaan sebagai berikut :⁴⁶

Tabel 4.1. Sifat dasar ekonomi politik dalam berbagai sistem perekonomian

No	Sifat Dasar	Kapitalisme	Sosialisme	Komunisme	Campuran
1	SD ₁ = sifat dasar kepemilikan	Individu	Industri dasar dimiliki negara, sisanya individu	Seluruhnya dimiliki negara	Individu dan negara
2	SD ₂ = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha	Individu Partnership Korporasi	Usaha bersama pada industri dasar dan individu lainnya	Negara	Individu dan negara
3	SD ₃ = insentif ekonomi	Keuntungan sebagai motif utama	Motif ekonomi dan non ekonomi	Insentif terbatas	Ekonomi, sosial, politik, dll
4	SD ₄ = mekanisme pembentukan harga	Pasar (S&D)	Pemerintah, birokrasi	Negara	Birokrasi hukum pasar
5	SD ₅ = Kompetisi atau persaingan	Eksis	Ada, bila negara mau	Tidak ada	Antara ada dan tiada
6	SD ₆ = Struktur organisasi	Desentralistik	Semi sentralisasi	Sentralisasi penuh	Desentralisasi
7	SD ₇ = Jenis insentif / dorongan	Materialistik	Sosialistik	Untuk ideologi	Gabungan

Sumber : Didik J. Rachbini, 1996

SEP = ∫ (S_{di}), dimana : SEP = sistem ekonomi politik, S_{Di} =sifat dasar pokok, SD₁ = sifat dasar kepemilikan, SD₂ = sifat dasar dalam inisiatif pembentukan badan usaha, SD₃ = insentif ekonomi, SD₄ = mekanisme pembentukan harga, SD₅ = kompetisi atau persaingan, SD₆ = struktur organisasi SD₇ = jenis insentif/dorongan

⁴⁶ Didick J.Rachbini, “ Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002

Dasar Hukum Sistem Ekonomi dan Politik Ekonomi.

Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangunan.

Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pengembangan sistem ekonomi itu sendiri. Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut maka akan lebih terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa. Walaupun dalam proses pembentukan *public policy* selalu terdapat suatu *public debate*, namun jika telah ada kesepakatan tentang suatu sistem ekonomi maka akan diredam terjadinya perselisihan pendapat dari suatu ekstrim ke ekstrim lain yang selain dapat memperlamban proses pengambilan keputusan juga akan menciptakan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.⁴⁷

Maka dalam hal ini suatu sistem ekonomi dan kebijakan politik merupakan suatu hal tak mungkin dapat dipisahkan. Karena suatu tindakan kebijakan politik dalam perkancahan

⁴⁷ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

negara sangat menentukan arah dan tindak lanjut dari sistem perekonomian yang dianutnya.

Dalam kaitannya, pengembangan sistem ekonomi suatu negara, sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi, seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya. Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya. Umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan berevolusi sistem ekonominya dari etatisme menuju ke liberalisme dan bersamaan dengan ini sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis. Sistem ekonomi⁴⁸ adalah kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-hwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa peraturan

⁴⁸ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

perundang-undangan ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dari kerangka institusi ekonomi ini dapat diketahui cara pengambilan keputusan di negara ini tentang apa lebih baik diproduksi, misalnya apakah lebih banyak beras atau pesawat terbang, apakah mesin tenun atau kedelai. Terkait dengan pengaturan tentang apa yang akan diproduksi adalah berapa besar peran dunia usaha swasta dan berapa besar peran dunia usaha Negara dalam spectrum sistem ekonomi yang digambarkan pada diagram, maka semakin besar bobot pengambilan keputusan ini dibuat oleh mekanisme pasar/harga maka sistem ekonominya lebih cenderung menjadi sistem ekonomi liberal/kapitalis. Sebaliknya, semakin cenderung keputusannya dibuat oleh lembaga pemerintah maka sistem ekonominya lebih merupakan sistem ekonomi yang didominasi intervensi pemerintah.

Sebagai hasil kemufakatan suatu masyarakat/negara, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis. Kemufakatan yang tercapai suatu saat biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu akan cenderung ikut berubah.

Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai ini maka suatu sistem ekonomi yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan berevolusi. Suatu ilustrasi dari perkembangan ini adalah GBHN yang telah diberlakukan setiap lima tahun di Indonesia sejak tahun 1973 dan terakhir pada tahun 1998.

Pengamatan atas perkembangan GBHN dari suatu periode lima tahun ke lima tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan berubah, yaitu tidak statis.

Suatu contoh saja adalah konsep Trilogi Pambangunyang baru muncul pada GBHN tahun 1973 ketika meningkat aspirasi akan perlunya peningkatan pemerataan dalam pembangunan. Pada periode selanjutnya, dengan mulai munculnya masalah-masalah dan tantangan baru pada saat itu, terutama terkait dengan jatuhnya harga minyak dunia dari puncaknya sebesar USD 33/barrel pada tahun 1982 menjadi USD 10/barrel pada pertengahan tahun 1986, mulai berkembang nilai-nilai baru yang menginginkan diadakannya berbagai langkah liberalisasi, sebagaimana tercermin pada dikeluarkannya berbagai “paket deregulasi”.⁴⁹

Suatu hal yang juga perlu dicatat adalah walaupun dapat terbentuk berbagai sistem ekonomi yang berbeda, setiap dan semua sistem ekonomi tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kaidah yang berlaku di ilmu ekonomi.

Satu kaidah ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, dalam mana harga suatu barang atau jasa tidak dapat tetap rendah jikalau permintaan meningkat sedangkan penwarannya tidak ikut meningkat.⁵⁰

Dalam sistem ekonomi yang diatur pemerintah, harga ini dapat tetap rendah tetapi harus disertai dengan adanya subsidi. Suatu kaidah ekonomi pada tataran makro adalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah jikalau tidak dapat berimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali ditingkatkan

⁴⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE-, 2000), 100.

⁵⁰ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 11

pajak atau dan ditingkatkan jumlah uang beredar dari segi kebijakan moneter. Kedua contoh berlakunya hukum ekonomi ini dan implikasinya (dalam contoh: perlunya subsidi dan perlunya pinjaman luar negeri atau/dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi yang semakin banyak dapat terselesaikan pada tataran sistem ekonomi, melalui berlakunya berbagai kaidah ekonomi, akan semakin mengurangi permasalahan yang harus diselesaikan pada tataran sistem politik.⁵¹

Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-rangan serta kekayaan, dimana dalam pemanfaatannya selalu menggunakan uang, tenaga waktu dan lain sebagainya yang berharga. Pada hakikatnya ekonomi adalah mengatur rumah tangga (keluarga, organisasi, negara, dsb.) secara efisien berdasar prinsip ekonomi, yaitu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Apa dan siapa yang dikorbankan, dan siapa yang memperoleh manfaatnya itu tergantung sistem ekonomi yang digunakan.⁵²

Sedangkan Politik secara ilmu, ialah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Politik merupakan urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara.

⁵¹ Arifin B. dan Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Grasindo, Jakarta, 2001

⁵² Arief Ramelan Karseno, *Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar*, dalam *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, ed. Dr. Mohtar Mas'ood, Yogyakarta: UII Press, 1999

Politik dalam arti kebijakan, ialah cara bertindak dalam menangani suatu masalah.⁵³

Hakikatnya politik adalah cara bertindak dalam menangani masalah, masalah ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai cara bertindak, politik adalah sebagai ide, maka diperlukan alat pelaksana ide yaitu pemerintahan. Ide hanya akan tinggal di “manara gading” jika tidak dilaksanakan atau dipraktekan. Melaksanakan atau mempraktekan ide diperlukan keberanian, yaitu mengubah keadaan lama menjadi keadaan baru yang lebih baik.⁵⁴

Sedangkan Kebijakan menurut bahasanya merupakan Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb); Dan hakekatnya merupakan bentuk pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk garis pedoman manajemen untuk mencapai sasaran; Kebijakan ini merupakan garis haluan pemerintah khususnya bidang ekonomi, yang mengatur dan mengawasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di negaranya.⁵⁵

Kebijakan merupakan taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi adalah taktik jangka pendek untuk mencapai sasaran, misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan kerja, mengatasi krisis, dsb. Karena waktunya pendek, maka taktik

⁵³ Arifin B. dan Didik J Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Grasindo, Jakarta, 2001

⁵⁴ Edi Suharto, *Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm 12-05-2008/09:47

⁵⁵ Didick J.Rachbini, “*Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002

tersebut harus dilakukan orang yang pandai, mahir, dan bijak (selalu menggunakan akal budinya).

Kebijakan Ekonomi Politik kegiatan nyata masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan kapital, dalam produksi, dan dalam distribusi (pemasaran) menentukan kesadaran dalam menentukan cara bertindak untuk mengatasi masalah kapital, produksi, dan distribusi. Hakikatnya ekonomi politik adalah kegiatan ekonomi menentukan kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan.

Jika kegiatan ekonomi berciri kapitalisme, maka kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan sistem ekonomi kapitalisme.

Jika kegiatan ekonomi berciri sosialis, maka kesadaran penguasa politik dalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan atau sosialisme.

Kebijakan politik menentukan kegiatan ekonomi. Politik ekonomi suatu negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis berorientasi menguntungkan kaum pemilik modal atau kaum kapitalis. Politik ekonomi suatu negara yang menganut sistem ekonomi kerakyatan berorientasi menguntungkan rakyat.⁵⁶

Paradigma ini didasarkan bahwa politik adalah suprastruktur yang merupakan cermin dari infrastruktur (sistem ekonomi). Dalam bahasa filsafat: kondisi riil menentukan kesadaran manusia, atau keadaan sosial menentukan kesadaran sosial, atau infrastruktur menentukan suprastruktur.

Di Indonesia, kebijakan politik telah sangat berperan penting dalam penentuan sistem kegiatan ekonomi contohnya seperti disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan kemudian

⁵⁶ Mubiyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Prosa, 1 Januari 1981, Jakarta

pada ayat ke 4 yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yang berbunyi:⁵⁷

- Pasal 33 ayat 1, “Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
- Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”
- Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
- Pasal 33 ayat 4, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya bersifat dominan, mendesak

⁵⁷ Mubiyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Prospa, 1 Januari 1981, Jakarta

⁵⁸ Mubiyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Prospa, 1 Januari 1981, Jakarta

dan memetakan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

- c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).⁵⁹

Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya pakar ekonomi senior Indonesia mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia “...pada dasarnya merupakan ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara...”.⁶⁰ Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “...lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila adalah pengembangan koperasi..penggunaan insentif sosial dan moral...komitmen pada upaya pemerataan...kebijakan ekonomi nasionalis...dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi...”⁶¹

⁵⁹ Mubiyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Prosa, 1 Januari 1981, Jakarta

⁶⁰ Wijoyo Nitusastro, *The Socio-Economic Basis of the Indonesian State*, 1959

⁶¹ Mubiyarto, Moral Ekonomi Pancasila, Prosa, 1 Januari 1981, Jakarta,

BAB II

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme

Dalam *Encyclopedia Britannica*,⁶² Kapitalisme dapat dideskripsikan secara paling ringkas sebagai kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan *Kapitalisme* itu sendiri adalah sistem yang mengarahkan “proses itu.”⁶³ Istilah tersebut berasal-usul sosialistik, yang mulai timbul pada paruh kedua abad ke-19 juga menunjukkan proses pengorganisasian produksi atau perdagangan di seluruh dunia dengan basis *individualistik*, *sekuleristik* dan *materialistik*.⁶⁴ Orang-orang dengan bantuan kekayaan yang terakumulasi sebelumnya, tetapi lebih sering dengan menggunakan uang yang dipinjam dengan bunga, memburu laba dan kekayaan bagi diri mereka sendiri dengan mempergunakan sejumlah besar tenaga manusia dengan imbalan upah.⁶⁵

Lebih jauh lagi kegiatan usaha (*enterprise*) individual adalah *napas* dari *Kapitalisme*. Ia memungkinkan kebebasan mutlak untuk memiliki salah satu dari ribuan lowongan sebagai upaya produktif atau komersial, untuk memilih lokasi guna

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, edisi 2, cet. IX, h. 950.

⁶³ Taqiyuddin AN Nabhani, Op-cit, h. 48

⁶⁴ Lihat definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Arkhan « ilmu ekonomi Islam Bertujuan melakukan kegiatan tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi.

⁶⁵ Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam, Comparative Study*, Edisi 1, Lahore, Pakistan: Ashraf Press, 1947. h. 1.

memperkejakan kualitas agen-agen produksi dan pasar bagi hasil produksinya, juga metode (sistem) untuk menjualnya seperti yang diinginkan.

Elemen Kapitalisme ini telah dikritik secara tajam oleh para *sosialis* dan *fasis* dari sudut pandang mereka masing-masing. Kaum sosialis terganggu oleh eksploitasi besar-besaran yang dimungkinkan oleh kapitalisme individualistik. Kaum fasis mencemooh pemborosan dan ketiadaan perencanaannya. Akan tetapi, eksperimen-eksperimen sosialis dan fasis mengungkapkan bahwa baik nasionalisasi dan perencanaan menimbulkan sejumlah besar penindasan manusia.⁶⁶

Kelemahan riil dari sistem kapitalis tidak ditunjukkan oleh keduanya. Penekanan keduanya pada eksploitasi dan ketiadaan perencanaan telah mendorong penghapusan keduanya ini dalam bentuk-bentuk kapitalisme selanjutnya, yang dicontohkan oleh New Deal dan Beveridge Scheme.⁶⁷ Namun cacat dasar Kapitalisme tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda tersembuhkan dan serangan itu tidak diarahkan pada titik lemah Kapitalisme.

Maka sesungguhnya secara historis perkembangan Kapitalisme merupakan bagian dari gerakan *individualisme*,⁶⁸

⁶⁶ Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam*, Comparative Study, Edisi 1, Lahore, Pakistan: Ashraf Press, 1947. h. 1.

⁶⁷ Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam*, h. 3

⁶⁸ *Individualisme sebagai suatu strategi flosofci pada organisasi ekonomi sesungguhnya tidak dapat memimpin pada suatu masyarakat ekonomi yang maju dan harmonis, malah ia dapat mengkontribusikan sejumlah problem-problem ekonomi antara lain : Pertama, ia dapat menggiring pada praktek-praktek eksploitasi oleh mereka yang ada pada posisi kuat dalam masyarakat dan ini akan menyebabkan konflik di masyarakat. Kedua, ia akan mengkontribusikan alokasi yang salah terhadap sumber-sumber ekonomi di negara tersebut. Ketiga, penggunaan sumber-sumber ini dengan unit-unit pabrik dapat menimbulkan*

gerakan itu juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain, seperti dalam bidang keagamaan yang menimbulkan reformasi; dalam bidang penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam; dalam bidang hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial; serta dalam ilmu ekonomi melahirkan sistem *Kapitalisme*.⁶⁹

Karena itu peradaban Kapitalisme sah (legitimate) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa Kapitalisme merupakan *sistem sosial ekonomi yang komprehensif*, lebih dari hanya sekedar tipe tertentu dari perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan selanjutnya menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.⁷⁰ Selanjutnya di Amerika lahirlah Kapitalisme berhubungan dengan banyaknya/melimpahnya material terhadap kemajuan peradaban industri dengan tingginya sistem dinamika kelas dalam demokrasi politik dengan pola/aturan-aturan kultural, (contohnya: individualisme); di mana masing-masing bisa dilihat sebagai peradaban dalam perencanaan ekonomi.⁷¹

Sementara sebagian orang mengatakan bahwa semangat Kapitalisme sering disalahtafsirkan dengan pengertian : “hasrat untuk memiliki sebanyak-banyaknya, khususnya uang”.

problem pada ekologi. Karena pada dasarnya individualisme tidak mempertimbangkan sifat dasar manusia, dimana manusia bukan hanya makhluk individu tapi juga kokktif sehingga seharusnya saling bergantung dan saling membutuhkan demi penyempurnaan makna hidup. Selanjutnya baca buku Islam and justice, pada tulisan Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, h. 60.

⁶⁹ Wiliam Eberstein, Edwin Focelma dan Alex Jemadu, (dkk), Alih Bahasa Alex Jemadu, Isme-isme Dewasalni, Edisi IX, Jakarta: Erlangga Press, 1994, h. 148.1

⁷⁰ Wiliam Eberstein, Edwin Focelma dan Alex Jemadu, (dkk), Alih Bahasa Alex Jemadu, Isme-isme Dewasa ini,

⁷¹ Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout rosperty, Equality andUberty, United States of America, 1986, h. 3.*

Werner Sombart⁷² dalam bukunya *Des Moderne Kapitalisme*, yang versi pertamanya telah diterbitkan pada tahun 1902, mengatakan bahwa Kapitalisme mempunyai tiga aspek yaitu: semangat, bentuk dan teknologi. Semangat itu diimplementasikan pada hasrat memiliki, persaingan dan rasionalitas. Bagi Weber, semangat “keserakahan tidak terbatas” tidak ada sama sekali kaitannya dengan Kapitalisme, bahkan Kapitalisme sering identik dengan sikap menahan diri dan sikap atau tempramen yang terkendali.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kapitalisme identik dengan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan usaha kapitalitas yang rasional dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dia mendefinisikan “tindakan kapitalis” sebagai usaha yang bertumpu pada harapan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan pertukaran atau perdagangan.⁷³ Menurut Weber keadaannya haruslah demikian, sebab dalam suatu tata masyarakat yang sama sekali kapitalistis, perusahaan kapitalis individual yang tidak dapat memanfaatkan kesempatannya untuk menciptakan keuntungan, akan membentur kematian.⁷⁴

Adanya keyakinan kita akan eksistensi Kapitalisme seperti itu diarahkan tidak hanya oleh keabsahannya tetapi juga oleh kepentingan historis. Maka di mana pun tidak ada kenyataan sejarah dan kultur diungkapkan dengan lebih jelas, dibandingkan konsep Barat tentang sejarah Kapitalisme.

⁷² Robert W. Green, *Protestantism and Capitalism, The Weber Thesis and His Critics*, D.C. Heath and Cimpany, New York, h. 7.

⁷³ Warner Sombart, “Capitalism”, dimuat dalam *Encyclopedia of the Social Science*, voi. 3-4, h. 196.

⁷⁴ Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York; 1958, hal. 17.

Adapun konsep *Fanfani* mengenai ciri-ciri pokok Kapitalisme berasal dari sejarah Eropa; dan ini muncul di kota-kota Italia pada abad ke-14, jika tidak lebih awal, dan tempat-tempat lain di Eropa.⁷⁵

Maka G.G Well berkata bahwa Kapitalisme adalah “suatu yang tidak dapat didefnisikan (selanjutnya mengenai dinamisasi tersendiri dalam memahami dan menginterpretasikannya terus berlangsung hingga sekarang) tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem Kapitalisme yang berarti suatu kompleks kebiasaan tradisional, perolehan energi yang tidak terkendalikan dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup”.⁷⁶

Pernyataan ini diperkuat oleh Syed Nawawi Haidar Naqvi yang penulis kutip dari buku *Etika dan ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*⁷⁷ menjelaskan bahwa Kapitalisme diartikan “suatu pencarian kekayaan yang ngotot dan tak terbatas melalui industrialisasi yang tak kenal lelah, pembatasan yang kaku atas pembelanjaan untuk konsumsi pribadi atau sosial, pemusatan waktu untuk mengurus usaha pribadi, eksploitasi yang sistematis dan tanpa ampun terhadap buruh.

Namun dalam memberikan batasan tentang Kapitalisme, para sosiolog dan sejarawan mengatakan : “Pada hakikatnya semua orang sepakat (dari sekian banyak defnisi tentang kapitalisme) bahwa Kapitalisme adalah suatu sistem yang

⁷⁵ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 310.

⁷⁶ Syed Nawawi Baqir Naqivi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, Alih Bahasa Husin Anis, Bandung: Mizan, 1985, h. 113.

⁷⁷ Aminore Fanfaru, *Catholicism, Peotestantism and Capitalism*, Sheed and Ward, London; 1938, h. 30-31.

menganggap *modal* adalah *utama*, *tenaga kerja bebas*, *disertai dengan persaingan yang tidak terkontrol (persaingan bebas)*, *kredit yang meluas*, *bank-bank makmur*, *industri bebas dan pasaran dunia menjadi satu*.⁷⁸

Berangkat dari masalah di atas, maka Kapitalisme bukanlah hanya sekedar *instrumental* ; tetapi juga konsep terhadap alasan historis dan tidak sulit untuk merekonstruksinya sehingga kapitalisme didefinisikan sebagai cara yang sudah termasuk penilaian tentang sistem ekonomi di mana beberapa tenaga kerja dieksploitasi terhadap yang lain dan sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya Feodalisme.⁷⁹

Pada bagian lain Max Weber mendefinisikan *Kapitalis* sebagai aktivitas ekonomi yang diorientasikan terhadap pasar dan perlengkapan untuk menghasilkan keuntungan dari pasar, jelasnya semua aktifitas hanya merupakan bagian kecil dari ekonomi secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi Weber berpendapat bahwa kata-kata kapitalisme diaplikasikan pada situasi di mana persyaratan-persyaratan ekonomi masyarakat/kelompok sangat menonjol.⁸⁰

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kapitalisme

Pada dasarnya perjalanan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya

⁷⁸ Aminore Fanfaru, *Catholicism, Peotestantism and Capitalism*, Sheed and Ward, London;1938, h. 30-31.

⁷⁹ Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition about prosperity, Equality andUberty*, United States of America, 1986, h. 3.

⁸⁰ Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout prosperity, Equality andUberty* , h.3

kapitalisme tahun 1948 (tahun perjanjian Westphalia) dipandang sebagai tahun lahirnya negara modern. Perjanjian tersebut mengakhiri perang tiga puluh tahun (antara Katolik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan negara mereka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan gereja Katholik Roma. Inilah awal munculnya *sekularisme*, sejak itu aturan main kehidupan dipisahkan dari gereja (yang menurut mereka wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan rakyatnya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupan, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhan). Sehingga prinsip dasar sekuler tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan/hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa/apa wewenang pembuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil.

Kenyataannya Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai pada masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara prinsip patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (*desicion making*) dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya secara adil dan menyeluruh.

Sedangkan an-Nabhani⁸¹ dalam bukunya *Nidzom Al-Islam* menerangkan bahwa penamaan ideologi ini dengan nama Kapitalisme, berawal pada kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemeras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Sementara para pemuka agama pada waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka selanjutnya menimbulkan pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan yang mana sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mudah sedangkan sebagian lagi mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar agama dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan lebih cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang selanjutnya menghasilkan usaha pemisahan agama dan dunia.

Disampaikan juga pendapat untuk tidak mempersoalkan agama, dilihat dari aspek diakui/ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia.⁸²

Walaupun demikian, Kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah “isme” biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebuah teori ekonomi, akan tetapi Kapitalisme telah

⁸¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Al-Islam*, Beirut: Libanon: Darul Ummah, 1953, Cet.V, h. 25.

⁸² Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Al-Islam*, h. 25

menjadi sebuah ideologi dunia yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik.⁸³

Lebih lanjut Lester C. Thurow dalam bukunya :⁸⁴
“Science the om^et of industrial revolution, when success come to be difned as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been mode to work any where. No one know how to run successful economic on any other principles. The market, and the market alone, rules and no one doubts it. Capitalism alone taps into medern beliefs about individuality and exploits what some would consider the basic human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of living. When it comes to creating to the wants, and desires of every individual, no matter”.

Pada dasarnya memperoleh ilustrasi tentang manifestasi Kapitalisme sangat diperlukan menurut interpretasi berbagai pengamat, walaupun mereka berbeda dalam teori. Seperti : Mandei yang melihat Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Hal ini berbeda dengan pandangan lain yang membagi tahapan kapitalis dari. “Kapitalisme Kompetitif ,, menuju Kapitalisme Monopoli” dan selanjutnya memasuki tahapan “Kapitalisme Negara Monopoli”, maka Mandei melihat perubahan-perubahan dalam sistem Kapitalisme dari gerak kapital dan perwujudan akumulasi kapital yang kini,

⁸³ Para ilmuwan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan sebuah “evolusi” yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagian terakhir abad pertengahan dan mungkin mencerminkan suatu “gaya hidup”. Selanjutnya baca dalam Winardi, *Kapitalisme Versus Sosiaisme, Suatu Analisis Ekotomi Teoritis*, Bandung: Remaja Karya, 1986, h. 33.

⁸⁴ Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, London: Nicholas Bearley Publishing, 1996, h. 17.

pada tahap kapitalisme mutahir, menurutnya dikendalikan melalui sistem perusahaan multinasional.⁸⁵

Namun pada dasarnya sejumlah kapitalisme itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Michel Beand, tidak hanya mengandung kapitalis destruktif tetapi juga sebagaimana yang terjadi di Indonesia *selama lima belas tahun terakhir*, di Eropa dan Amerika Utara, di Jepang dan Korea Selatan atau Singapura telah mendemonstrasikan kapitalis kreatifnya, tidak saja dalam menyediakan kebutuhan material dan kenyamanan, tetapi juga dalam mendinamisasikan kondisi kebudayaan dan spiritual.

Sesungguhnya jika suatu paham ingin dikatakan memiliki ciri Kapitalisme adalah :⁸⁶ a). Menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuas “keinginan” individu sebagai sesuatu yang penting untuk kesejahteraan manusia; b). Menganggap kebebasan individu tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi, memiliki dan mengatur kepentingan pribadi sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu ;⁸⁷ c). Mengasumsikan inisiatif individu

⁸⁵ M. Dawam Raahardjo (Ed), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Jakarta: LP3ES, 1987, hai XI .

⁸⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Hkonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: risalah Gusti, 1999, h. 18.

⁸⁷ *Oleh sebab itu kapitalisme menjadi sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Ini diakibatkan karena “hukum-hukum” ekonomi pasar peperti hukum-hukum fsika yang absah secara obyektif, maka berhasil atau kegagalannya tidak seyogyanya dinilai dengan kekurangan dan kemiskinan bagimereka yang ketinggalan dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup. Lebih jauh setiap orang adalah hakim yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan jika dibiarkan sendiri, tidak hanya akan menjadikan dirinya baik tetapi juga dalam jangka panjang akan menjadikan baik semua orang. Untuk lebih jelasnya baca dalam Umer Chapra, dalam *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h. 37.*

bersamaan dengan *fase decasion* (pengambilan keputusan) yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumberdaya; d). tidak mungkin perlunya peranan penting pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi, dan e). Mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh *semua individu* secara otomatis memenuhi *kepentingan sosial*.

Hal ini berarti pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah, akan selalu mendorongnya untuk lebih memilih lapangan kerja yang paling “menguntungkan bagi masyarakat”, tetapi dengan mengarahkan industri seperti ini mungkin hasilnya memiliki nilai terbesar, seperti dalam banyak hal lain sistem ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat untuk mendorong tujuan yang bukan merupakan bagian dari maksudnya, namun tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat karena masyarakat bukan bagian dari maksudnya itu. Jadi dengan memburu kepentingannya sendiri berarti mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan bila sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya.

Walaupun kemudian istilah itu oleh para ahli teori sosial dianggap sebagai isme atau sistem pemikiran, namun kapitalisme⁸⁸ bukanlah suatu paham yang dipropagandakan oleh orang-orang yang dianggap pendukungnya. Bahkan pada

⁸⁸ Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dimana Kapitalisme mempunyai kegagalan pada masa lampau dan kita harus mencegah hal tersebut terulang kembali, namun terlepas dari kekurangan-kekurangan itu bahwa Kapitalisme telah menjadi sistem perekonomian “unggul”. Untuk lebih jelasnya baca bukunya Rich Devos, dalam *Compassionate Capitalism, (Kapitalisme dengan Kepedulian Sosial)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, h. 6.

awal XX, ketika Kapitalisme sebagai suatu tahanan perkembangan, namun ekonom terkemuka seperti : Charles Gide, Canwas, Marshall, Seligman atau Cassel-boleh dikatakan mengutuk/menganggapnya sebagai istilah terlarang, yang tidak boleh dipakai dalam pembahasan ilmu ekonomi.⁸⁹

Sebab istilah “Kapitalisme” mengundang arti yang berbeda dan bersumber dari berbagai teori, antara lain diartikan sebagai sistem pemikiran yang berpretensi nettai; sebagai tahapan sejarah yang dialami oleh masyarakat; juga sebagai suatu paham yang diperjuangkan atau ditentang.

Terlepas pro dan kontra terhadap keberadaan Kapitalisme sebagai sistem ekonomi, maka penulis ingin mengkaji langsung aplikasi praktis tentang penerapan Kapitalisme dengan mencontohkan penerapan di Amerika. Banyak ekonom menyebut bahwa puncak sentral pelaksanaan Kapitalisme ada di Amerika, hai itu nampak pada perusahaan yang bebas, persaingan dalam bisnis, menganggap gelar/derajat kebebasan adalah hak azazi dan meminimalisir campur tangán pemerintah dalam bisnis pribadi, kemajuan mereka dalah hai ini karena mengacu teori dan kebijakan Laissez faire laissez passer.⁹⁰

Adam Smith sebagai pelopor/tokoh aliran Kapitalisme ini, dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation*” beranggapan bahwa segala sesuatu

⁸⁹ Dewam Rahardjo, (Ed), Op-cit, h. IX.

⁹⁰ James Harvei Dood, C.W. Hasek, *Ekonomi Principles and Application*, Soudi Wastern, (New York; Publishing Commpany, 1948), hai. 41. menurut *J. Barkley Rosse, Jr. Marina V. Rosser*, dalam bukunya *Comparative Economics in a Transforming World Economy*, pada hai 14, mengatakan yang dimaksud dengan terminologi *laissezfaire* adalah pandangan yang menyatakan minimnya intervensi pemerintah dan dalam istilah *francis* daiartikan dengan “biarkanlah mereka melakukan itu”.

merupakan perintah alam, kaitannya dengan konsep *laissez faire* Kapitalisme, di mana pemerintah seharusnya menerapkan hukum yang netral yaitu dengan memiliki rasa hormat terhadap alam dalam menjalankan produksi dan bisnis.

Bisnis seharusnya diakui dengan aturan itu sendiri; menurut *hukum alam*.⁹¹ Walaupun telah begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smith-lah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya Kapitalisme yang telah mulai berjangkit sejak revolusi Industri, dan makin berkembang dengan penemuan-penemuan Smith pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan “anak haram”-nya yang kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan yang sezaman, “anak haram” yang memberontak dalam wujud komunisme itu dapat muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada masyarakat buruh yang diperas dan dihisap. Sementara Karl Marx, si bidan yang di “nabi”-kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya menulis tentang Kapitalisme, mengupas dan meramal keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya “Das Kapital”. Namun Kapitalisme tidak segera mati seperti yang diramalkan Marx, tetapi justru pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya dari Kapitalisme.⁹²

⁹¹ James Harvei Dood, C.W. Hasek, *Ekonomi Principles and Application*, Soudi Wastern, hal 41.

⁹² M. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian* Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddtn, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986, hal. xii.

Tetapi sikap pemerintah Amerika terhadap bisnis tidak pernah pasif yang mana selama kurang lebih 3 (tiga) kwartal/abad setelah pembuatan konstitusi (undang-undang) pemerintahan harus aktif dalam mempromosikan perusahaan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi bantuan finansial yang bertujuan untuk membangun barak-barak, jalan kereta api, sambungan komunikasi dan mendirikan bank-bank; bantuan untuk pertanian dalam berbagai bentuk serta meningkatkan tarap industri rajau, mereka mendorong penciptaan keuntungan dan itu juga berarti kemajuan bagi *kesejahteraan umum*.

Walupun demikian, Amerika, Swedia, Prancis dan Jepang menurut penulis belum bisa dikatakan sebagai penganut Kapitalisme murni, sebab masih ada bagian-bagian yang kebajikannya diambil dengan ketentuan pemerintah, misalnya dalam hal pendapatan dari produksi dan distribusi, namun paling tidak Amerika bisa dikatakan negara yang paling dekat dan paling dominan dalam menerapkan ekonomi Kapitalisme murni tetapi tetap saja jauh dari modal yang asli karena sangat besar tuntutan pemerintah terhadap barang dan jasa.

Ekonomi Amerika juga memiliki kontrol melalui perusahaan raksasa yang ironisnya lebih banyak mengadakan koalisi dan koordinasi daripada berkompetisi.⁹³ Lebih jauh lagi Amerika yang merupakan pendekar utama negara yang mengatur sistem ekonomi Kapitalis ini, telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Hal itu bisa dibuktikan, bahwa separo dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420

⁹³ Zimbakst Andres, Howard J. Sherm, Stuart Brown Comparing Economics System a Political-Economic Opproach, 2 Edisi, Harcourt Broce Javanovindi Sandiago, 1989, h. 3.

unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki/dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit perusahaan industri raksasa saja (dimana kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dolar US).⁹⁴

Kenyataan itu barangkali menggambarkan ketidaknyamanan masyarakat Amerika, yang kaya, diusik ketentramannya. Mereka mengkhawatirkan derasnya investasi asing yang menjadikannya dijajah secara ekonomis. Awal dari itu semua bisa dilihat pada kebijakan Reagan sebagai penganut paham “*supply-side economics*”, dia berpendapat bahwa cara yang paling tepat menggairahkan ekonomi adalah merangsang sisi produksi dan agar rakyat tergerak untuk memproduksi, maka pajak dikurangi. Tarif pajak tertinggi untuk orang-orang kaya diturunkan dari 70 % menjadi 28 % tetapi teragisnya, sisi pengeluaran ternyata gagal dilaksanakan/disesuaikan dengan penurunan sisi pendapatan (akibat penurunan pajak).

Anggaran militer membengkak dan sebagai akibat AS mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah.⁹⁵ Dan pada saat yang bersamaan, AS mengalami defisit perdagangan yang cukup parah, maka terjadilah kelangkaan dana dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal, tabungan yang berhasil dihimpun tidak mencukupi akibat gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Pada saat itulah, modal dari luar masuk secara tiba-tiba akibatnya selama 10 tahun (1978-1988) arus masuk modal internasional berlipat hingga mencapai total

⁹⁴ Suroso Imam Zadjuli, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Surabaya: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999, h. 2

⁹⁵ Hendro Basuki, Ekonomi Amerika dalam Pembentukan, Suara Merdeka, No. XLI/14/VI/24 Februari 1993, h. 4-9.

1.8 triliun dolar. Sedangkan total investasi AS dalam periode yang sama hanya 1.3 triliun dolar.

Dalam mengantisipasi persoalan ini, maka Clinton pada saat itu mencoba untuk menawarkan beberapa program ekonomi seperti :⁹⁶ (1) Peningkatan investasi, (2) Disiplin dalam bidang moneter dan fiskal, (3) Menciptakan daya saing yang tinggi dan liberalisasi, (4) Kerja sama yang erat antara karyawan dan perusahaan serta (5) Keterbukaan pasar dunia.

Lebih lanjut Clinton mengimplementasikannya dalam 4 paket yaitu: Pertama, kebijakan jangka pendek yang memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar setengah juta orang dalam dua tahun berikutnya. Kedua, kebijakan pemotongan anggaran termasuk di dalamnya anggaran militer, subsidi pertanian, proyek ruang angkasa dan sejumlah program lainnya. Ketiga, kenaikan pajak sebesar 70 % sebagai suatu kenaikan luar biasa yang di tujukan untuk kaum menengah yang berpendapatan Rp 60 juta keatas. Sedangkan paket kebijakan keempat, investasi baru yang bertujuan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi. Dan program ini dinilai strategis untuk mempersiapkan AS menghadapi masa depan.⁹⁷

Dari keempat paket tersebut, memang ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan naik, paling tidak bergerak sekitar 3 %. GDP akan bergerak dari angka 2 % (1992) menuju 3,1 % (1993). Tetapi yang agak bisa dipastikan, pengangguran hanya mampu turun sekitar angka 1,5 % menjadi 6,7 % dari angka

⁹⁶ Hendro Basuki, *Ekonomi Amerika dalam Pembentukan*, h.4-9.

⁹⁷ Hendro Basuki, *Ekonomi Amerika dalam Pembentukan*, h.4-9.

2,5 juta pengangguran. Selanjutnya dua masalah yang pasti akan muncul adalah invasi, yang bisa mencapai 3,5 % karena dorongan investasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dan Fortune memprediksikan edisi januari 1993, tingkat konsumsi masyarakat akan naik menjadi 3,2 % di bandingkan tahun lalu yang hanya 3%.

Adapun yang terajadi sekarang, perekonomian AS terns berkinerja dengan baik, walaupun sangatlah penting bahwa kita terus membuat rencana dengan hati-hati; khususnya dengan menyisihkan pangsa terbesar dari surplus-surplus anggaran terproyeksikan untuk membayar hutang nasional. Dan untuk mengetahui gambaran tentang peranan perusahaan dalam perekonomian AS, kita dapat melihat bahwa 50 perusahaan industri terbesar mempunyai andil 80 % dari total penjualan sektor industri, 75 % penyediaan lapangan pekerjaan diantara semua perusahaan industri. Dalam dasawarsa terakhir kecenderungan kearah skala yang besar ini telah meningkat, dalam sektor ekonomi non-industri yang penting seperti perbankan, asuransi jiwa, dan pelayanan jasa kepada masyarakat umum untuk konsentrasi pemilikan saham dan kontrol bahkan lebih besar daripada dalam bidang industri.⁹⁸

Dan klimaksnya yang nampak sekarang adalah peran negara industri maju seperi Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Belanda telah mencapai 63,37 % terhadap GWP.⁹⁹

⁹⁸ Wiliam Eberstein, Edwain Fogelma dan Alex Jemadu, Alih Bahasa Alex Jemadu, *Isme-isme Dewasa ini*, Jakarta; Erlangga, 1994, Edisi IX, h. 154.

⁹⁹ Suroso Imam Dzajuli, *Indonesian International Currency System*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1998, h. 3

Ironisnya perkembangan ekonomi ketujuh negara industri maju tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang. Untuk lebih sistematisnya, akan dijelaskan kronologis/uraian lahirnya istilah kapitalisme dan sistem kapitalisme itu sendiri sebagai berikut: ¹⁰⁰

1. Kapitalisme Awal

Kapitalisme awal dimulai di negara Inggris, di mana industri sandang pedesaan terus tumbuh pesat selama abad ke-16, 17 dan 18. Jadi industri wool memelopori kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi serta untuk pertama kali membuatnya berakar di tanah Inggris, sehingga pendayagunaan “surplus sosial” cara produktif merupakan prestasi istimewa yang membuat kapitalisme mampu mengungguli semua sistem ekonomi sebelumnya. Di antara berbagai kejadian dan lingkungan yang secara pasti mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada tahap awal berkembangnya kapitalisme, ada tiga hal yang patut diberi perhatian khusus yaitu: *Pertama*, dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat. *Kedua*, pengaruh logam-logam mulia dari dunia baru terhadap pembagian relatif atas upah, laba dan sewa. *Ketiga*, peranan negara-negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk modal yang multifungsi.

¹⁰⁰ M. Dawam Rahardjo, Op-cit, h. 17.

2. Kapitalisme Klasik

Dari kapitalisme awal tadi kemudian berlanjut ke kapitalisme klasik yang dimulai abad ke-18 fokus pembangunan kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Revolusi industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan, sehingga akumulasi modal yang terus-menerus selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil baik pada abad ke-18. dan kapitalisme sebagai penggerak kuat bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan upaya penemuan-penemuan baru yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa karya besarnya Adam Smith yaitu *An inquiry into the nature and Causes of the Wealt of Nation (1776)* mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas.

Dalam pandangan Smith, keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar, sebab kebijakan-kebijakan *laissez faire* liberalisme politis abad ke-19 mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat (dengan standar emas), anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan menurun. Singkatnya, prinsip yang mengembalikan individu-individu kepada diri mereka sendiri dan percaya bahwa interaksi-interaksi yang tidak diatur akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang diinginkan. Sehingga sistem ini biarpun

didefinisikan secara baik dan ditandai koherensi-logis, harus dipahami semata-mata sebagai sistem dari berbagai kecendrungan. Sebab secara lebih définitif dibanding dengan semua kurun historis lainnya, (maksudnya perkembangan yang terjadi pada fase sebelumnya di mana kaum bisnis tidak berkuasa secara politis) perkembangan ini dapat diterangkan semata-mata secara ekonomis.

Ia merupakan sukses dari usaha kapitalis mengingat kaum borjuis ke posisi yang untuk sementara sangat berpengaruh, sukses ekonomi menghasilkan kekuatan politis, yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan proses kapitalis. Jadi para industrialis Inggris memperoleh perdagangan bebas merupakan faktor utama dalam suatu période ekspansi ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

3. Fase Lanjut (sejak 1914)

Perang Dunia I (pertama) menandai titik balik perkembangan Kapitalisme pada umumnya dan kapitalisme Eropa khususnya. Sejak tahun 1914 menyaksikan adanya pembalikan minat publik kepada Kapitalisme dan terbaliknya hampir pada semua aspek yang dimulai dari kurun liberal sebelum perang, di mana Kapitalisme Eropa menjalankan kepemimpinan kuat dalam masyarakat ekonomi internasional. Pasar dunia saat itu berkembang pesat, standar emas hampir menjadi universal, Eropa bertindak selaku bank dunia, Afrika menjadi jajahan Eropa, sementara Asia dibagi-bagi menjadi berbagai wilayah dan pengaruh yang dominan oleh kekuatan-kekuatan Eropa dan Eropa tetap menjadi pusat peningkatan volume perdagangan internasional.

Namun sesudah Perang Dunia I, keberpihakan-keberpihakan itu terbalik arah, di mana pasar internasional surut, standar emas ditinggalkan dan alat pembayaran nasional yang terkendali lebih dikuasai, hegemoni perbankan berpindah dari Eropa ke Amerika Serikat, dan rakyat Asia dan Afrika berhasil bangkit melawan kolonialisme Eropa dan berbagai hambatan perjalanan bertambah banyak, puncaknya revolusi Rusia sebagai akibat perang, tidak hanya membongkar posko lembaga kapitalis yang berupa pemilikan pribadi atas sarana produksi di wilayah yang luas tetapi lebih jauh lagi tetapi membongkar struktur kelas dan agama yang sudah mapan. Di atas segala-galanya *Laissez Faire*, kebijakan yang menjadi kesempatan abad ke-19 telah dipermalukan oleh perang dan pengalaman sesudah perang.

Terlepas dari adanya keberhasilan yang dimiliki oleh ekonomi kapitalisme, namun tidak semua orang/negara yang bisa menerima atau setuju terhadap model kebijakan ekonomi kapitalisme, maka muncul berbagai kritik walaupun pada hakikatnya kapitalisme hanyalah “hasil sampingan” dari filsafat politik yang bernama *liberalisme* yang berkembang di zaman pencerahan (*Enlightenment*) pada abad ke-18. Semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat dan sejarah umat manusia dapat disimpulkan sebagai kemajuan (*progress*) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntunan spiritual dari lembaga agama apapun tidak lagi diperlukan.¹⁰¹

¹⁰¹ M. Amin Rais, *Cakraivala Islam; Antar Cita dan Fakta*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996, h. 91.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan ternyata kapitalisme tersebut justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian dan menciptakan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping munculnya keserakahan pendukung kapitalisme serta individualisme yang menyebabkan alienasi. Meskipun dalam dunia empiris tidak mungkin kita temukan kapitalisme murni, di mana barang-barang ekonomi yang tersedia dalam masyarakat didistribusikan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, tetapi setiap sistem ekonomi yang pada dasarnya bersifat kapitalis mempunyai beberapa kelemahan yaitu:¹⁰²

Pertama, kapitalisme melahirkan ketidaksamaan (*inequality*), atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, umumnya orang mengakui bahwa kapitalisme memang dapat mendorong produktivitas yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melipatgandakan kekayaan, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan ketimpangan. *Kedua*, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bersifat Interansional, jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu negara tertentu. Kapitalisme Internasional dapat mempertahankan hidupnya lewat eksploitasi yang dilakukan atas dunia ketiga. *Ketiga*, demi kepentingan ekonominya, kekuatan kapitalis selalu bersikap “*double-standart*”.

Kapitalisme langsung atau tidak, berkaitan dengan sistem operasi internasional demi kelangsungan kepentingan ekonominya. Sebagai contoh: Amerika Serikat yang sering menamakan dirinya benteng demokrasi lebih sering membantu kelangsungan rezim-rezim di dunia ketiga yang operatif

¹⁰² M. Amin Rais, Cakraivala Islam; Antar Cita dan Fakta, h.91

terhadap rakyatnya. Jadi, pihak Amerika sangat menghargai hak asasi manusia dan etika politik yang cukup tinggi (kasus jatuhnya Presiden Nixon karena skandal Watergate), tetapi di pihak lain prinsip-prinsip penting itu sama sekali tidak menjadi problem jika menyangkut negara lain. *Keempat*, Kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan sama (*equality of opportunity*) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis. *Kelima*, semboyan Kapitalisme yang berupa “berproduksi untuk dapat berproduksi lebih besar” menyebabkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialistas. Jadi melimpahnya produksi tidak lagi menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, karena ia telah menjadi tujuan itu sendiri. *Keenam*, sebagai konsekuensi logis dari cara produksi seperti diatas, lahirnya pola kehidupan konsumerisme.¹⁰³

Dan kegagalan ekonomi kapitalisme yang paling mencolok seperti yang dikatakan dan diakui oleh Hillary Clinton yaitu : munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (kapitalis) dengan negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi telah menggejala sejak Perang

¹⁰³ Drs. Misanam Munrahim, MA., Ec, P.hD, dalam Kuliah Filsafat Ekonomi Islam, pada tanggal 8-10-1999, *lebih ringkas lagi mengatakan bahwa berbagai konsep yang lemah dalam kapitalisme yaitu: 1) Hukum Ekonomi dianalogikan dengan Hukum Alam, 2) Prilaku rasional; self interest, 3) Positivisme Ekonomi; Bahwa sesuatu yang terjadi dalam ekonomi itulah yang sesungguhnya terjadi; no value, dan 4) Hukum Say Supply Creates it is Own Demand (penawaran diciptakan oleh permintaan itu sendiri). Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa problem dasar ekonomi diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tak terbatas, sementara itu sarana pemuasnya sangat terbatas. Agar proses produksi tersebut dapat selalu terdorong dan disisi lain persoalan konsumsi serta distribusi ekonomi dapat selalu terjaga seadil-adilnya, maka manusia mengembalikan kepada hukum pasar bebas yaitu hukum yang kendalikan oleh Supply and demand.*

Dunia II. Saat itu Amerika Serikat memiliki 40% dari seluruh kekayaan dunia, padahal berpenduduk hanya 6% dari seluruh penduduk bumi.¹⁰⁴ Menurut World Bank Report pada tahun 1979, penduduk Amerika dan Eropa Barat hanya 16,5% dari penduduk dunia dan menguasai duapertiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang disebut *sebagai negara transfer atau revising finansial fows*. Artinya fenomena ini menggambarkan sesungguhnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana mereka ke dunia berkembang tapi sebaliknya, yaitu dunia berkembang yang membuat dunia maju. jumlah negara transfer pada tahun 1984-1990 diperkirakan USS 180 milyar.¹⁰⁵

Lebih jauh lagi adanya sistem kapitalis yang ditopang oleh perkawinan ilmu dan teknologi canggih, memang telah memberikan ketamakan/keseronokan kepada segelintir manusia. Tapi Herbert Marcuse lebih jelas lagi mengatakan bahwa buah dari sistem ini ialah “memudarnya dimensi bagian dalam dari pikiran, pupusnya kekuatan kritis dari rasio, ketertundaan kepada fakta-fakta kehidupan”. Dan demi pemenuhan dorongan hedonistik, alam smesta telah dilukai melalui cara-cara yang tidak beradab, bumi menjadi terluka parah.¹⁰⁶

Mungkin kita masih bisa menemukan kelemahan-kelemahan Kapitalisme yang lain, jika kita menggunakan etika al-Qur’an tentunya akan nampak jelas sekali kelemahan

¹⁰⁴ Hillary Clinton, *It Takes a Village*, Alih bahasa Widodo, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996, Cet. 1, h. 269

¹⁰⁵ Ruslan Abdul Gani, Hartan Merdeka, 28 Februari 1997, h. 4 .

¹⁰⁶ Ahmad Svaf’i, *Islam dan Polttik; Upaya Membingkai Peradaban*. Cirebon: Pustaka DINAMIKA, 1998, h. 194

tersebut, sebagai contoh dalam konsumsi, al-Qur'an mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kebutuhan (prinsip moderasi) atau tidak boros, sementara dalam ekonomi Kapitalisme seseorang dianjurkan untuk memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu dengan sepuas puasnya. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan antar konsep al-Qur'an yang penuh dengan muatan etika/moral dalam berekonomi.

Terlepas dan segala kekurangan yang ada pada teori ekonomi tersebut, namun akseptabilitas dari teori ini sudah sangat tinggi di dunia. Paham kapitalis saat ini sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan negara-negara yang dulunya menganut paham komunis seperti Rusia dan beberapa negara ex Uni Soviet dan RRC, saat ini tatanan kehidupan ekonominya juga sudah tidak menunjukkan lagi penolakan terhadap paham ekonomi tersebut. Uniknya perluasan ini telah menjangkau dunia Islam, terbukti dengan banyaknya ekonom di negara-negara itu yang secara terang-terangan menganut paham tersebut. Hal ini tentu saja sedikit banyak telah memberi warna terhadap analisis-analisis ekonomi Islam.¹⁰⁷

Kenyataan ini diperkuat lagi (dan menurut penulis memang harus diakui) bahwa ekonomi Islam belum memiliki alat analisis yang orisinal dari khasanah ekonomi Islam sendiri, ataupun alat analisis ekonomi Barat. Walaupun adanya asumsi bahwa alat analisis yang dimiliki ekonomi Barat bersifat matematis-analisis saja, sehingga dipandang bebas nilai. Asumsi inilah yang sebenarnya merupakan ekspresi amoralitas

¹⁰⁷ Munrokhim Misanam, *Vendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, Surakarta: 17 Mei 1998, h. 2.

dari ekonomi Kapitalisme. Jika penggunaan alat ini akan terus dilakukan, maka dikhawatirkan hasil postulasi ekonomi Islam “sama” (tidak jauh berbeda) dengan ekonomi Kapitalisme. Atau jika tidak hanya memberi label “moral” terhadap ekonomi Kapitalisme.¹⁰⁸ Oleh sebab itu kita harus menemukan formulasi yang tepat untuk membangun ekonomi Islam secara integral.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis

a. Kebebasan Memiliki Harta

Secara Individu Semua negara mengetahui hak kebebasan seseorang atau individu masing-masing untuk memiliki harta kekayaannya. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa adanya kendala atau hambatan. Seseorang mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.

Setiap individu berhak memiliki manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.

b. Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas

Setiap orang untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang dikehendakinya. Individu juga berhak terjun dalam segala bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak- banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk

¹⁰⁸ Munrokhim Misanam, Vendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam. h..2.

mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah dan menurut peraturan negara tersebut. Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntutannya, yaitu persaingan bebas, maka untuk itu setiap orang dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut.

Ketimpangan Ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidak samaan kesempatan mewujudkan jurang perdebatan diantara golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin semakin melarat.¹⁰⁹

Keadaan masyarakat atau bangsa dalam suatu negara tidak boleh terjadi dalam keadaan adanya jurang perbedaan antara golongan kaya atau miskin karena akan timbul dampak négatif yang tidak dikehendaki, bagi mereka yang kaya akan berbuat aniaya (sewenang-wenang) pada masyarakat kecil (fakir miskin), karena mereka kurang memiliki pengetahuan agama (etika) yang baik dalam mengelola perekonomiannya.

Sedangkan dalam ajaran ekonomi Islam tidak demikian. Mereka yang kaya diwajibkan menolong yang miskin, baik melalui zakat atau infaq-infaq yang lainnya, sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Islam tidak sependapat dengan cara-cara ekonomi Kapitalis.

¹⁰⁹ Lihat Afzalur Rahman, Doktrin iikonomi Islam, Jakarta: Dana Baku Wakaf,1995, Jilid I,h. 2

Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis

Adapun kebaikan-kebaikan sistem ekonomi Kapitalis adalah sebagai berikut :

- a. Mereka yang mendukung sistem ekonomi Kapitalis menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka sebut dasar hukum ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktifitas. Hal ini disamping berupaya meningkatkan kekayaan negara, tetapi juga dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat.
- b. Persaingan bebas diantara perorangan akan menimbulkan tahap “produksi” dan “tingkat harga” pada tingkat yang wajar dan akan membantu memperoleh penyesuaian yang rasional diantara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Karena itu, dasar hukum akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.
- c. Para pakar ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang baik, sama halnya dengan maksud untuk memaksimalkan produksi. Semakin kecil kesempatan untuk memperoleh keuntungan, semakin kurang semangat untuk giat bekerja dan meningkatkan setiap orang untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin, maka setiap individu akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimal serta berusaha untuk melakukan produksi yang maksimum.

Dengan cara tersebut di atas kualitas dan kuantitas produksi akan diperbaiki, semua prinsip produksi yang ada akan digunakan untuk mencapai motivasi tersebut, barang-barang konsumsi dapat digunakan dengan kuantitas yang besar. Dengan demikian motivasi untuk mendapatkan keuntungan sangat berguna untuk kepentingan perorangan.¹¹⁰

Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Di antara kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Kapitalis sebagai berikut :

- a. Kompetisi yang bebas dan tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat, apabila hal itu mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, sebagaicontoh, hak perorangan yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan yang melampaui batas oleh beberapa individu. Hal ini menjadikan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya mengakibatkan rusaknya sistem ekonomi.
- b. Persaingan bebas menyebabkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan perseorangan dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidak selarasan dalam masyarakat. Jika kekayaan hanya dimiliki oleh segolongan kecil perorangan, maka akan mempergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang jelas mereka akan mengorbankan kepentingan utama masyarakat, karena semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.

¹¹⁰ Afzalur Rahman, Doktrin iikonomi Islam, h.2.

- c. Kompetisi di antara kepentingan perorangan dan masyarakat secara perlahan merupakan bagian terpenting dalam masyarakat keseluruhan, dimana hal tersebut sangat mengganggu sistem ekonomi.
- d. Nilai-nilai moral yang baik seperti persaudaraan, kerja sama, saling tolong-menolong, kasih sayang dan kemurahan hati, tidak berharga dan tidak diperdulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu akan digantikan oleh nilai-nilai seperti sifat mementingkan diri sendiri, pendendam dan permusuhan pada sesama. Sejumlah orang bekerja untuk mencapai motivasi pribadi dan tidak terdapat tujuan yang mendorong mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Adakalanya terdapat individu yang mengesampingkan kepentingan masyarakat umum demi mencapai keinginan pribadi masing-masing.
- e. Perbedaan yang jelas antara hak-hak majikan dan pekerja akan mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang bersaing yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang menerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan saingannya yaitu seorang majikan kapitalis tadi, yang mempunyai segala kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterampilan teknik yang sempurna dan pekerjaan yang layak. Ketidakadilan ini semakin memperdalam jurang antara yang kaya dan yang miskin.¹¹¹

¹¹¹ Afzalur Rahman, Doktrin iikonomi Islam, h.11

Hal demikian itu menyebabkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur dikalangan para ahli, penafsiran yang salah, ide- ide yang keji dan tidak bermoral. Dalam usaha seseorang mengumpulkan kekayaan, ia lebih mengutamakan cara yang curang dan cara-cara hidup yang tidak bermoral, dan berupaya untuk menjadi konglomerat (hartawan) yang menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Ringkasnya dalam sistem ekonomi kapitalis, di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi dibawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan soal-soal kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang tidak wajar. Di sisi lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja (yang merupakan sebagian faktor produksi) kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kesempatan dari semua penjelasan di atas merupakan akibat dari keinginan yang tidak terbatas terhadap harta benda dan persaingan bebas.

Individualisme Asas Kapitalisme

Prinsip dasar kapitalisme nampak jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakannya. Pemikiran individualismenya sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain kecuali ada manfaat yang diraihinya. Mereka tidak mementingkan kemaslahatan orang lain, apabila hai itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Slogan mereka adalah “bersaing dengan lawan” dan berusaha untuk mengalahkannya.

Sikap kapitalisme tanpa memperdulikan apa dan siapa kecuali untung dalam jumlah besar. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang diingat hanya tertuju uang, uanglah yang dapat menyelesaikan segala masalah, uanglah yang dapat menciptakan negara makmur dan kehidupan tenang. Baginya tempat tumpuan, tempat peribadatan yang terbesar untuk menyembah uang adalah pasar dan bank, sehingga mereka menilai kedudukan manusia sesuai dengan adanya pengaruh uang yang dipunyainya. Individu dalam sistem kapitalis adalah merupakan salah satu proses perputaran ekonomi. Perorangan merupakan penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonominya. Negara tidak berhak mengatur individu, jelasnya negara harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perorangan. Perorangan bebas berbuat sekehendak hatinya, baik perbuatan yang mendatangkan untung atau sebaliknya. Golongan kapitalis tidak peduli, apakah tindakan mereka itu mengakibatkan dampak positif atau negatif bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu mempunyai harga diri dan eksistensi. Terbuka bagi orang kapitalis jalan untuk mengembangkan bakat. Sekalipun demikian, dalam banyak hal, sistem kapitalis merupakan malapetaka atau menyengsarakan bagi kehidupan manusia.

Karena dalam paham kapitalisme ditemukan sikap ego. Bencana yang timbul dari sikap itu, menimbulkan ambisi untuk menumpuk harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa pernah merasa puas. Mereka diumpamakan seperti neraka jahannam, yang diungkapkan al-Qur'an dalam surat Qaaf (50) ayat 30, sebagai berikut :

“Pada hari itu, Kami bertanya kepada neraka jahannam: “Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, “masih adakah tambahan?””

Sedangkan masyarakat awam atau masyarakat biasa, terutama kaum lemah dan tertindas adalah merupakan masyarakat tersisihkan, dianggap sampah masyarakat dan dianggap tidak ada artinya dalam pembangunan di era globalisasi ini.

Negara Penganut Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal ini pada awalnya dianut negara Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara liberal di dunia. Negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan Suriname. Selain di benua Amerika, di benua Eropa juga ada yang menganut sistem ekonomi liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Ceko, Slovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom.

Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino. Sedangkan yang menganut sistem ekonomi ini di benua Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Bahkan saat ini semakin banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura. Bahkan di kepulauan Oceania juga ada yang menganut sistem ekonomi ini yaitu Australia dan Selandia Baru.

Namun, sistem ekonomi liberal ini terbilang masih baru di Afrika. Karena pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe. Tetapi secara murni, sekarang ini tidak ada satu pun negara yang menganut sistem ekonomi liberal.

BAB III

SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Sejarah Timbulnya Gerakan Sosialis

Abu Dzar al Gifari meninggal tahun 32 H (652 M), adalah salah satu di antara yang telah merintis gerakan sosialisasi keagamaan di kalangan umat Islam. Setelah berabad-abad lamanya barulah timbul gerakan sosialisasi di dunia Barat. Walaupun banyak persamaan di dalam tujuan, akan tetapi dasar pergerakannya sangat berlainan dari gerakan perintis itu. Abu Dzar mendasarkannya kepada agama, sedangkan gerakan sosialis dunia di bangkitkan oleh perbaikan nasib buruh, persoalan gaji dan persoalan materi yang tidak ada kaitannya dengan masalah ketuhanan. “menurut penjelasan para ahli-ahli penyelidik dunia bahwa, faham sosialisme dunia di dalam gerakannya yang belum teratur belumlah lama usainya.¹¹²

Adapun pemakaian perkataan sosialisme yang pertama kali, masih diperdebatkan orang dalam permulaan abad ke XIX yang lampau. Menurut Grunbreg,¹¹³ bahwa perkataan itu dipakai pada tahun 1808 M, oleh pendeta Italia yang bernama Guailani, pada waktu itu perkataan sosialisme disamakan

¹¹² Munrokhim Misanam, Vendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, Surakarta: 17 Mei 1998, h. 2.

¹¹³ M.Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddtn, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986, hal. xii.

dengan arti “*Katholicisme*” sebagai lawan dari “*Protestanisme*”.

Di Inggris pengikut-pengikut Robert Owen, pertama kali menggunakan perkataan itu. Sedangkan di Prancis pertama kali yang memakainya ialah Vinet. Penulis Perancis L. Rebaud yang menulis buku “*Etudes Sur Les Reformateurs Un Socialistes Modernes*” (tahun 1864 tebit, cetakannya ke 7) menganggap dirinya orang yang pertama mendapatkan perkataan itu, menjadi perdebatan yang sengit dalam Majelis rendah Inggris pada tahun 1923 M tentang arti perkataan sosialisme, merupakan suatu bukti yang sejelas-jelasnya atas demikian.

Ada juga yang memberi arti bahwa sosialisme ialah pelaksanaan dari pelajaran Yesus Kristus. Tetapi anggota yang lainnya mengartikan bahwa sosialisme ialah pengawasan atas perusahaan-perusahaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹¹⁴

Karena hebat dan pentingnya perdebatan itu, maka majelis memutuskan akan mengumpulkan segala pendapat-pendapat yang berbeda itu dalam satu buku yang di beri nama “*What is Socialism*”¹¹⁵

Pendapat Janet yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad: bahwa yang dimaksud Sosialisme itu, ialah tiap-tiap pelajaran, yang mengajar bahwa negara berhak memberikan pemerataan kekayaan yang ada di antara manusia, dan berhak

¹¹⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 30

¹¹⁵ M.Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian* Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddin, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986, hal. xii.

melaksanakan keseimbangan menurut hukum, dengan jalan mengambil dari mereka yang mempunyai kelebihan untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan; dan tindakan ini jangan hanya diambil terus menerus.¹¹⁶

Demikian pula Adolf Held yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad menambahkan bahwa sosialisme itu menghendaki penundukan kemauan perseorangan kepada kemauan masyarakat.¹¹⁷ Sedang Kirkup berpendirian bahwa pokok dari segala macam-macam pendapat itu ialah para sosialist menghendaki supaya semua industri dikemudikan oleh masyarakat dan hasil-hasilnya dibagi dengan adil.¹¹⁸ Baik professor Diepenhorst maupun Kirkup keduanya sependapat bahwa amat sulit untuk menentukan arti sosialisme, karena amat jauh perbedaan faham antara ahli yang telah menulis tentang soal itu.

Sedangkan Mr. A. Luhrs¹¹⁹ dalam bukunya “Burgerlijk en Socialistische denken” (1946), karena menengok berbagai macam gerakan sosialis yang mengatakan bahwa seseorang yang mengaku dirinya sosialis, masih harus diselidiki lagi, Faham sosialis manakah yang dipegangnya? Orang harus mengakui bahwa gerakan sosialis yang pertama itu adalah dilakukan oleh Abu Dzarr, seorang pemimpin Islam yang hidup dalam abad ke-6/7. Gerakan itu dimulai dari kota Damascus, Syiria, ditengah lingkungan tuan-tuan tanah dan

¹¹⁶ Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 30.

¹¹⁷ Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 30.

¹¹⁸ M.Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddin, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986, hal. xii.

¹¹⁹ Zainal Abidin Ahmad, Ibid, h. 98-101

kaum-kaum agama nasrani dengan budak-budak belian dan rakyat umum.

Di samping tujuan dan pendiriannya tegas, serta konsekuwen dan fanatik memegang keyakinannya dan berjuang terus menantang pemerintah Mu'awiyah yang dipandangnya reaksioner-penghianat, tetapi juga Abu Dzar sebagai pemimpin sanggup menderita dan mengakhiri hayatnya dengan kepahitan yang luar biasa sebagai korban dari pendiriannya itu. Semboyan Abu Dzar al Giffri yang terkenal "Wahai kaum yang mampu, bantulah kaum proletar yang tidak berpunya".¹²⁰

Dua orang pernah menulis suatu buku bernama "Teori Ekonomi Sosial" pada tahun 1938 M, di Amerika yaitu Oscar Lange, Lektor Ilmu Ekonomi University Of California, Lektor (luar biasa) di university Craeowu dan Polish free University di Warsawa. Buku itu diberi kata penuntun oleh Fred M. Tylor, Profesor tentang politik perekonomian dan keuangan, University of Michigan. Buku tersebut diberi prakata pendahuluan yang lebar dan panjang oleh Benjamin E. Lippineott, Assistant profesor in The Political Science, University of Misnessota. Secara terus terang Lippineott memulai tulisannya dengan berkata:

Dalam tradisi kuno kapitalis, terdapat kepercayaan bahwa perekonomian sosialis itu adalah suatu perekonomian yang tidak dapat di peraktekan. Seperti halnya dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya di dalam kebudayaan kapitalis, maka kepercayaan ini tidak saja banyak dianut oleh orang-orang awam kebanyakan, tetapi juga oleh ahli-ahli ekonomi. Dari

¹²⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Ibid*, h. 98-101

semua keberatan-keberatan yang diajukan terhadap sosialisme, tidak satupun yang berkata lebih daripada ucapan ini, “Bahwa sosialisme itu tidak dapat dilaksanakan dalam praktek”.¹²¹

Ruslan Abdulgani dalam bukunya “Sosialisme Indonesia” yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad, ia mencoba menguraikan cita-citanya dengan uraian yang panjang lebar tentang “Sosialisme Utophia” dan “Sosialisme Ilmiah” lalu akhirnya, “Usaha mensintesir Islam dan Marxisme” dan juga usaha mensintesir Islam, Marxisme dan Nasionalisme”.¹²²

Dari uraian di atas dengan tidak mengurangi jasa para pahlawan sosialis yang hidup dikemudian hari, adalah merupakan suatu kehormatan bagi dunia pada umumnya dan kaum sosialis khususnya, apabila mereka mengakui bahwa gerakan sosialis yang agak teratur sudah timbul pertama kali pada abad ke-6/7 M. di bawah pimpinan seorang muslim Abu Dzarr al-Giffari. Dengan penjelasan ini bukanlah merupakan tujuan menyatakan bahwa haluan sosialis itu sesuai dengan ajaran Islam di suatu sisi tetapi di sisi yang lain tidak ada persamaan karena haluan sosialis maupun faham atheis (tidak bertuhan), hanya mementingkan materi saja.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis ¹²³

- a. **Pemilikan harta oleh negara**
Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak

¹²¹ Oskar Lange dan Fred M. Taylor., Teori Ekonomi Sosialisme, Minnesota, USA, 1938, diterjemahkan oleh Drs. Paul Sitohang, Jakarta: Bharata, 1964, h. 60

¹²² Zainal Abidin Ahmad, Ibid, h. 98-101

¹²³ Afzalur Rahman, Op-cit, h. 10.

diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak kepemilikan.

- b. Kesamaan ekonomi
- c. Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walupun sulit ditemukan disemua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.
- d. Disiplin politik
Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi, kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.

Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis¹²⁴

Sistem ekonomi Sosialis mempunyai kebaikan-kebaikan sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudian fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain.
- b. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara.
- c. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna diantara produksi dengan

¹²⁴ Afazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Yogyakarta: Dana Baku Wakaf, 1992, h.1.

penggunaannya, dengan demikian masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

- d. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.¹²⁵ Menurut pendapat penulis walaupun keadaan itu diatur demudan tetapi masing-masing individu tidak merasa bebas sesuai dengan hati nuraninya.

Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis¹²⁶

Sistem ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- a. Tawar menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.
- b. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terkait kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
- c. Sistem ekonomi Sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan kepentingan individu. Dengan demikian jelas mereka tidak berusaha

¹²⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Ibid*, h. 98-101

¹²⁶ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 10

untuk mencapai kejayaan yang menjadi tujuannya; misalnya karena undang-undang saja belum mencakupi untuk memperbaiki kesalahan seseorang tanpa disertai dengan pendidikan moral dan latihan. Sebaliknya, dibalik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik diantara majikan dengan penerima upah, sistem Sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam antar mereka. Secara keseluruhan sistem ini mencoba untuk mengubah ketidak samaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efesiensi kerja buruh.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa dalam sistem sosialis semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat akan terbagi dalam beberapa kelompok. Seluruh kekuasaan akan berada ditangan golongan kaum buruh (*proletarial*) yang kurang berpendidikan dan beradab, kezaliman, penindasan dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya dari pada sistem ekonomi Kapitalis.

Sosialisme Menolak Hak Individu

Dasar peraturan sosialisme bertolak belakang dengan kapitalisme. Sosialisme bersikap dan berprasangka buruk terhadap individu, mereka merampas segala hak pribadi demi

mencapai kemaslahatan bersama. Tujuan mereka adalah "kemaslahatan bersama atas kemaslahatan individu". Pengakuan hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan perbuatan yang dzalim dan menyimpang sehingga harus ditindak. Segala macam usaha yang mengarah kepada pengakuan hak milik pribadi harus dihapuskan/dimusnahkan, sekalipun dengan jalan kekerasan, hal yang demikian itu yang menimbulkan rasa dengki dan dendam. Merupakan satu prinsip penting yang harus diwujudkan adalah "sama rata dan sama rasa".¹²⁷

Untuk mencapai tujuan, paham sosialis berpegang kepada kekuasaan, tepatnya kekuasaan negara dan pemimpin yang diktator. Menurut paham sosialis, negara merupakan penggerak dan pedoman bagi perekonomian rakyat, perorangan sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta kekayaan negara, tugas rakyat hanya satu, sebagai abdi negara, melaksanakan tugas dari penguasa.

Posisi individu menurut paham sosialis adalah seperti tentara atau prajurit dalam front peperangan, mereka tidak mengatur strategis peperangan dan tidak diikutsertakan dalam memikirkan mana yang terbaik, tugasnya hanya melaksanakan apa yang digariskan oleh komandan tertinggi yang harus dipatuhi. Apabila diperintah maju menyerang, maka mereka mematuhi dan jika dikatakan mundur, maka mereka menarik diri ke belakang. Mereka sekali-kali tidak mempunyai hak bertanya "mengapa" dan "bagaimana", apalagi mengatakan "tidak". Sistem kapitalis memberikan fasilitas kepada perorangan, sehingga menjadi besar dan bertindak

¹²⁷ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

sewenang-wenang, tanpa menghiraukan kemaslahatan masyarakat baik materi maupun spiritual. Sistem sosialis keadaannya sebaliknya dari sistem kapitalis. Paham sosialis menutup semua apa yang diberikan oleh paham kapitalis kepada individu, sehingga perorangan merasa rendah, dan kehilangan kepribadiannya dan mempersembahkannya kepada masyarakat yang tertutup kepada negara. Maka di sini negara berbuat sewenang-wenang, dan negara tidak lebih suatu tempat yang di kelola oleh segelintir manusia.

Akhirnya paham sosialis ditemukan beberapa orang, yaitu pejabat negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sedangkan para konglomerat dalam sistem kapitalis berlaku sewenang-wenang juga.

BAB IV

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Definisi Sistem Ekonomi Campuran dan Idiologi Politiknya

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Perpaduan ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian.¹²⁸

Jadi, dapat diartikan sebagai jalan tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Jalan tengah ini disesuaikan dengan keadaan saat perpaduan itu terjadi sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem campuran tersebut. Sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh negara berkembang.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran¹²⁹

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.

- a. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah.
- b. Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah.

¹²⁸ Wikipedia .2014. Sistem Perekonomian. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

¹²⁹ Deni Aulia. 2013. *System Ekonomi Campuran*. http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system_ekonomi_campuran.html

Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran¹³⁰

- a. Beban pemerintah berat dari pada beban swasta.
- b. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.

Sistem ekonomi campuran merupakan panduan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Proses penyatuan ini dilakukan untuk menyerap elemen-elemen yang positif dan dinamis dari kedua sistem ekonomi tersebut. Sistem ini merupakan gabungan dari kekuatan dua sistem ekonomi tersebut.

Sejarah Sistem Ekonomi Campuran

Sejarah pertentangan yang keras dan bahkan tidak harmonis dari kapitalisme dan sosialisme telah menstimulasi pemikir-pemikir untuk mencari bangun ekonomi dengan ciri dasar yang merupakan gabungan unsur-unsur terbaik dari keduanya.¹³¹ Sebenarnya, sistem ekonomi ini dapat saja menghilangkan konotasi perpaduan antara dua sistem ekonomi tersebut karena sistem ekonomi campuran memiliki ciri khasnya tersendiri.

Sistem ekonomi campuran menggerakkan elemen-elemen dinamis yang sebelumnya memang dimiliki tiap-tiap sistem ekonomi. Sebenarnya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut telah menuju ke arah sistem campuran karena masing-

¹³⁰ Deni Aulia. 2013. *System Ekonomi Campuran*

¹³¹ Ardi Djaja. 2012. *Sistem Ekonomi Campuran*. <http://ard-cerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html>

masing berusaha membuang kelemahan-kelemahannya sehingga tersisa unsur-unsur yang dinamis dan positif.¹³²

Seperti yang dikatakan Hegel¹³³ bahwa perkembangan sebuah pemikiran akan mencapai suatu bentuk terbaik melalui proses dialektik menuju suatu sintesa (teori dialektika). Proses ini merupakan perbandingan dari thesa dengan antithesa dalam keharmonisan dan menuju ke arah kedinamisan.

Negara yang sedang berkembang beranggapan akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan banyak tidak mencontoh bentuk ekstrem sistem ekonomi tersebut, tetapi menyerap unsur-unsur dinamis dari keduanya. Salah satu pemikiran Hegel ini menarik untuk disimak sebagai dasar pemikiran mengapa muncul sistem ekonomi campuran sebagai alternatif dari sistem yang bertentangan.¹³⁴

Bila hal itu terjadi, kedua sistem ekonomi tersebut memiliki kelemahan mendasar sehingga cara terbaik, yaitu menggabungkannya untuk mengejar ketertinggalan negara-negara yang sedang berkembang. Fenomena dialektik sebagai suatu teori ini ditemukan oleh kelompok idealisme dan mengalami masa puncaknya dalam pemikiran filosofi Hegel.¹³⁵

Dialektik pernah diajukan oleh Immanuel Kant sebagai suatu logika dari penalaran terhadap alam dan fenomena dunia untuk memberikan pengesahan yang transenden. Kemudian,

¹³² Meri Herliyani. *Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 2009. Vol. 6 (2): 192-205.

¹³³ Josephine. *Sistem Perekonomian Di Dunia*. 2013 <http://josephinejoe.wordpress.com/2013/03/13/sistem-perekonomian-di-dunia/>

¹³⁴ M.Dawam Rahardjo. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. Jurnal UNISIA. 2009. Vol. XXXII (72): 113-128.

¹³⁵ M.Dawam Rahardjo. *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. Jurnal UNISIA. 2009. Vol. XXXII (72): 113-128.

Hegel menginterpretasikan dialektik sebagai operasionalisasi dari penalaran, tanpa kaitan dengan hal yang transeden.¹³⁶

Hal ini memberikan kenyataan lebih benar dan lebih mendalam dibanding pemikiran analitis kontradiksi sebagai hasil dari perpaduan ide-ide yang dapat dicapai melalui cara sintesa untuk menghasilkan pengetahuan lebih benar.

Proses sintesa yang meningkat menjadi alasan utama terwujudnya sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan dari sistem kapitalisme dan Marxisme.¹³⁷ Hal ini tidak seperti Karl Marx yang mengadopsi dialektik sebagai pembenturan kelas di dalam sejarah yang selalu saling berhadapan. Motif mencari keuntungan adalah unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan produksi. Akan tetapi, bukan segalanya sebagaimana ditekankan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Tanpa motif keuntungan, tidak akan ada usaha dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat jika motif ditekan dan dimatikan seperti di negara komunis. Sistem ekonomi campuran tetap berbasis pada prinsip pasar yang terkendali oleh aturan pemerintah.

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu.¹³⁸ Garis tengah

¹³⁶ Meri Herliyani. *Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 2009. Vol. 6 (2): 192-205

¹³⁷ Grace Banne Pabutungan. 2012. *Sistem Ekonomi Pasar/Liberal dan Sistem Ekonomi Campuran*.
<http://gracebannepabutungan.wordpress.com/2012/03/30/sistem-ekonomi-pasarliberal-dan-sistem-ekonomi-campuran/>

¹³⁸ Grace Banne Pabutungan. 2012. *Sistem Ekonomi Pasar/Liberal dan Sistem Ekonomi Campuran*

disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta (masyarakat) saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi dengan tujuan untuk mengoreksi distorsi ekonomi.¹³⁹ Diakuinya hak kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi campuran ini tidak membuat semua faktor produksi yang vital / penting juga bisa menjadi kepemilikan pribadi karena kepemilikan faktor produksi yang vital akan tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah akan memberikan jaminan sosial serta mengupayakan pemerataan distribusi pendapatan. Tentang penetapan harga, walaupun harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar, namun bila diperlukan pemerintah juga perlu mengadakan pengawasan serta koreksi terhadap harga-harga tersebut. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan dengan tujuan agar perekonomian tidak lepas kendali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.¹⁴⁰

Karena merupakan penggabungan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, Penerapan sistem ekonomi campuran ini akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat karena

¹³⁹ Canya Pramesthi. 2013. *Macam- Macam Sistem Ekonomi*. <http://canyapramesthirm.blogspot.com/2013/04/macam-macam-sistem-ekonomi.html>

¹⁴⁰ Deni Aulia. 2013. *System Ekonomi Campuran*. <http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system-ekonomi-campuran.html>

berimbangya peran pemerintah dan swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian.

Sistem ekonomi campuran memiliki ciri tersendiri seperti halnya sistem ekonomi lainnya, yaitu:¹⁴¹

- Adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian.
- Adanya pihak swasta yang turut berperan dalam kegiatan perekonomian
- Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi Negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang.
- Hak milik swasta atas alat-alat produksi.
- Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.
- Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.
- Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.
- Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Negara Penganut Sistem Ekonomi Campuran¹⁴²

Sistem ekonomi campuran ini banyak dijumpai di negara negara yang berkembang atau bekas negara non-blok yang mayoritas berada di Asia dan Afrika, seperti Indonesia, Mesir,

¹⁴¹ Gede Pradnyana. 2012. *SISTEM EKONOMI “ TRADISIONAL ”*. <http://gedepfad.blogspot.com/2012/08/sistem-ekonomi-tradisional.html>

¹⁴² Vina Shafa. 2013. *NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT SISTEM EKONOMI CAMPURAN, LIBERAL, TERPUSAT DAN TRADISIONAL*. <http://vinashafa.blogspot.com/2013/05/negara-negara-yang-menganut-sistem.html>

dan Malaysia. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua jenis sistem ekonomi, yaitu Market socialism dimana peran pemerintah yang tampak lebih dominan dan Social Market dimana mekanisme pasarlah yang lebih dominan walaupun tetap ada campur tangan dari pemerintah. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran Market Socialism adalah Swedia. Sedangkan contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran Social Market adalah Inggris dan Jerman.

Kelebihan dan Kekurangan Dari Sistem Ekonomi Campuran

Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi campuran adalah :¹⁴³

- Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.
- Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.
- Kebebasan berusaha.
- Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
- Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak.
- Kegiatan usaha pihak swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah.
- Pemakaian tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan.
- Penetapan harga lebih terkendali.

¹⁴³ Ardi Djaja. 2012. *Sistem Ekonomi Campuran*. <http://ard-cerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html>

- Hak perorangan secara nyata diakui.
- Beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- Sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usahanya.¹⁴⁴
- Adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai di swasta.

Setiap negara tentu memiliki sistem perekonomian yang berbeda tergantung kepada sistem pemerintahan di negara tersebut. Setiap sistem ekonomi juga tentu memiliki perbedaan dalam hal peraturan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun, setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Jadi, sistem-sistem ekonomi yang ada tentu ada menguntungkannya bagi negara yang menganut, namun juga ada merugikannya bagi negara tersebut.

Sebaiknya setiap negara dalam memilih sistem ekonomi yang akan dipakai di negara tersebut jangan melihat atau mengikuti negara lain, tapi sesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Karena kondisi perekonomian di setiap negara tentu belum pasti sama.

¹⁴⁴ Ardi Djaja. 2012. *Sistem Ekonomi Campuran*. <http://ardcerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html>

BAB V

SISTEM EKONOMI ISLAM

Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Hasanuzzaman,¹⁴⁵ ekonomi Islam yaitu “*islamic Economics is the knowledge and application of injunction and riles of the Sjari*”*ah that prevent injustice in the aqcusition and disposal of material resources in order to provide to satisfaction to human being and anable tehem to perform their abligation to Allah and the society*”.

Di dalam definisi tersebut terungkap aktivitas ekonomi yaitu dari kata-kata “perolehan” dan “pembagian”. Aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah Syari’ah yang di dalamnya mengandung perintah (*injunction*) dan peraturan (*rules*) tentang anjuran/perintah dan larangan.

Pengertian “memberikan kepuasan terhadap manusia” merupakan sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat”, dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi tapi juga mengakomodasikan peran pemerintah dalam mengatur dan merencanakan semua aktifitas ekonomi termasuk

¹⁴⁵ S.M. Hasanuzzaman, dalam karangannya, Definition of Islamic conomics, Jutnai of Research in Islamic Economics, vol. 1, No.2/2984, h .50

di dalamnya pajak dan zakat.¹⁴⁶ Jadi paradigma ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama mencapai kemenangan dan kebahagiaan (falah) di akhirat yang menekankan keseimbangan antara dimensi spritual-kolektif. Namun demikian peranan mekanisme harga dan pasar tetap merupakan suatu instrumen yang berperan dalam mengoleksikan sumberdaya secara efisien sebagai suatu upaya mensejahterakan masyarakat.¹⁴⁷

Selanjutnya M. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa defnisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian yaitu, *Pertama*, pengertian tentang ekonomi itu sendiri, yakni “pengetahuan tentang penggalian dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia”. *Kedua*, mengenai “penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari’at” dengan kegiatan ekonomi, dalam rangka “melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat”. *Ketiga*, keterangan mengenai predikat “Islam” dalam ilmu ekonomi.¹⁴⁸

Selanjutnya jika telah diketahui masalah ilmu ekonomi, maka tugas kita dalam melakukan penelitian terhadap ekonomi Islam adalah mengenai ajaran Islam atau pengetahuan Syari’ah pada umumnya dan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya bidang mu’amalah.

¹⁴⁶ Husein Sawit, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; perlukah berbeda, Op-cit, h. 3.

¹⁴⁷ Imamudin Yuliadi, Metodologi Ekonomi Islam; Utiktas, (No.9. Tahun ke-7/1999). h. 84

¹⁴⁸ M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, cet. 1,1999, h. 20.

Dr. Munawar Iqbal, Direktur Institut Internasional Islamic University, Islamabad, Pakistan mengatakan : Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan Hadits adalah batu-ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.¹⁴⁹

Sementara Mohamed Aslam Mohamed Haneef, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah *“An approach to interpreting and solving man’s economic problems based on the values, norm, laws and institutions in, and derived from, the sources of knowledge in Islam”*.¹⁵⁰

Berdasarkan defnisi di atas, ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan kebijakan yang merupakan interpretasi terhadap sumber pengetahuan dalam Islam. Dan dalam mengembangkan pemikiran dan kebijakan ekonomi, metodologinya harus dibentuk sebagaimana aturan dalam melakukan interpretasi dan mengembangkan disiplinnya. Adapun metodologi Islam tersebut meliputi “Prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengajaran yang didasarkan pada hukum-hukum Syari’ah” (dan kami menambahkan nilai, norma dan institusi). Dari bagian yang mendukung pembuktian.¹⁵¹ Bukti-bukti ini terdiri dari bukti pokok dan kedua berdasarkan

¹⁴⁹ M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, h.20

¹⁵⁰ Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Islam, The Islamic Worldview, and Islamic „Economies, Malaysia, HUM (Journal of Economies & Management 5, No. 1), International Islamic University Malaysia Press, 1997, h. 50.

¹⁵¹ Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Islam, The Islamic Worldview, and Islamic „Economies. H.50

sumber-sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Sumber ini bisa dikategorikan kedalam “wahyu, akal dan alam”.

Lebih jauh lagi Akhyar Adnan menjelaskan setidaknya ada landasan flosofs, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri yaitu: tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah, mas’uliyah dan ukhuwah. Dan pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsip sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada, misalnya menyangkut pemilikan secara umum, pemilikan pribadi, distribusi kekayaan, moneter, larangan atas riba, zakat, larangan atas beberapa keinginan ekonomi, nilai-nilai positif yang harus dipatuhi dan nilai-nilai négatif yang harus ditinggalkan.

Beliau melanjutkan bahwa:¹⁵² *“Pemahaman yang mendalam membuktikan jika sesungguhnya sistem yang ditawarkan Islam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sistem yang lain; baik sosialisme dan kapitalisme. Tidak sedikit yang mengistilahkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkeadilan”*.

Selanjutnya Suroso Imam Zadjuli,¹⁵³ mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/ perundang-undangan Islam (Sunnatullah). Sumber terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Qur’an, al-Hadits dan

¹⁵² Muhammad Akhyar Adnan, Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri., Kabar Kampus, 29 Desember 1999, h. 3

¹⁵³ Muhammad Akhyar Adnan, Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri, h. 8-9

Suri Tauladan perilaku ekonomi Islam pada zaman khalifah. Namun lanjutnya hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan Sistem Ekonomi Islam secara totalitas/menyeluruh, yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial saja seperti halnya zakat, Bank Islam, Riba dan sebagainya.

Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa SEI (Sistem Ekonomi Islam) merupakan sistem yang mandiri dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem-sistem yang lain. Adapun yang membedakan SEI dengan sistem ekonomi yang lain adalah :¹⁵⁴

- a. Asumsi Dasar/Norma Pokok ataupun aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang di berlakukan. Dalam SEI asumsi dasarnya adalah “Syari’ah Islam” yang berlaku secara komprehensif dan universal.
- b. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku Khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme dengan menggunakan aksioma *etika Islam*.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Muhammad Akhyar Adnan, Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri., Kabar Kampus, 29 Desember 199, h. 9-10

¹⁵⁵ Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami, Bandung: Mizan, 1985, h. 116.

Pertama Kapitalisme gagal menjawabantahkan kesatuan kehidupan (makna hidup yang sesungguhnya) dengan penekanan yang berlebihan pada nilai material manusia dengan mengorbankan aspirasi ruhaniyah. Padahal sesungguhnya penghambaan terhadap perolehan material akan membekukan sifat kreatif manusia dan mengeringkan sumber kebahagiaan yang mengalir dari karya-karya kreatif tersebut.

Menurut sudut pandang Islami, sikap seperti itu mengaburkan usaha manusia dengan cara yang membahayakan, malah harus dipalingkan untuk mewujudkan sifat teomorfosisnya. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan : *"Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpuknya; ia mengira bahwa kekayaannya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api yang menganga* (Q.S. al-Humazah: 2-4). Karena itu, perolehan uang sangat disusutkan posisinya dalam skala nilai manusia menurut etika Islam.

Kedua, kapitalisme merusak keseimbangan alam. Sebab kekayaan terpusat pada segelintir orang; dengan alasan bahwa kaum kayalah yang berhak melakukan investasi. Sementara dalam Islam, kehidupan adalah saling bekerja sama, walaupun sama sekali tidak menafikan persaingan, namun Islam tidak mengakui sebagai cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan manusia.

Sebab di bawah panji Kapitalisme, persaingan bebas sangat memperparah ketidakadilan sosial. *Ketiga*, kapitalisme tidak menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif dalam pengertian dan tingkat yang sama dengan yang dilakukan Islam. Memang benar, bahwa tanggung jawab dipaksakan atas

individu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti pajak pendapatan progresif. Padahal sesungguhnya menghindari kewajiban membayar pajak akan mengakibatkan ketidakpekaan individu terhadap tanggung jawab sosial dan Islam menolak perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab.

Maka sesungguhnya lahirlah “ilmu ekonomi Islam” sebagai kebenaran, perlu diupayakan untuk menuntun kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka regenerasi kebudayaan dari *homo-economicus* menjadi *homo-Islamicus*. Lebih jauh lagi berhasilnya proses regenerasi alam dalam arti Islamisasi ekonomi bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam mengubah struktur sosial yang opresif dan tidak adil yang selama ini ada.¹⁵⁶

Walaupun demikian, keberadaan ekonomi Islam tersebut tidak berarti kita harus menghapuskan model-model ekonomi yang sudah ada saat ini, tetapi seharusnya ekonomi Islam dapat memberikan kontribusinya dengan melengkapi dan mengoreksi apa yang sudah ada dengan teori ekonomi Islam.

Dan untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan dalam menerapkan sistem ekonomi Islam, dibutuhkan bangunan teori ekonomi yang mendukungnya, sejauh mana teori-teori ini bisa berjalan maka perlu pengujian. Pengujian teori ini dapat dilakukan kalau konsep-konsep ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam itu. Selanjutnya ini lembaga tersebut masih sangat terbatas namun perkembangannya positif ada.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ahmad M. Saefuddin, *ILkonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987, h. 223

¹⁵⁷ Adi Suandi Hamid, *Kurikulum dan Silabi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LP3EI-UII, 1998), h. 5

Jadi ekonomi Islam tersebut, memang ada dan bisa dibuktikan secara *normatif namun empirik*.¹⁵⁸ Seperti yang dikatakan oleh Islahi dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, walaupun menurut Ibn Khaldun pada kenyataannya pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah lebih bersifat *normatif* dibandingkan nuansa *positif*.

Adapun yang dikatakan ekonomi positif adalah suatu pembahasan mengenai kondisi riil dalam hubungan ekonomi atau “*what is*”. Sedangkan ekonomi normatif adalah suatu pembahasan mengenai apa saja seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu atau “*what ought to be*”. Sumber nilai ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah tidak saja berbicara persoalan pada dataran normatif tapi juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi riil dalam masyarakat, contohnya: “*Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup*”.¹⁵⁹

Ayat ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan/kekayaan akan menimbulkan berbagai macam perilaku yang eksekif atau melampaui batas. Sementara dalam ayat lain dijelaskan: “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang telah diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah-ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah*

¹⁵⁸ Munrahim Misanam, dalam *Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep Ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi*, Yogyakarta: 1998, h. 1.

¹⁵⁹ Q.S. Al-‘Alaq; 6-7.

tempat kembali yang baik (surga).”¹⁶⁰ Dan ayat tersebut di atas menerangkan kecendrungan umum masyarakat atau seseorang yang mengasumsikan perilaku masyarakat terhadap harta yang tak terbatas. Namun diingatkan dalam ayat tersebut bahwa di akhirat (surga) jauh lebih tinggi nilainya daripada yang ada di dunia.

Berangkat dari sini kita dapat mengambil suatu benang merah bahwa kecendrungan masyarakat akan harta merupakan sesuatu yang alami namun perilaku tersebut harus di kendalikan dengan adanya ganjaran yang lebih besar di akhirat. Maka sesungguhnya dalam perspektif Islam aspek normatif dan positif saling berkaitan, sebab setiap upaya memisahkan kedua aspek itu akan berakibat timbulnya distorsi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶¹

Namun demikian penulis masih ragu jika keberadaan ekonomi Islam tersebut kita mendasarkan diri/mengacu pada praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab menurut hemat penulis apa yang dilakukan Nabi bukanlah metode/ilmu ekonomi Islam seperti yang ada selama ini dan jika ada secara mikro ekonomi, namun belum tersusun secara sistematis tentunya belum bisa dikatakan sebagai suatu ilmu ekonomi yang memang sudah “*taken for granted*” dalam agama (baca: Islam). Tetapi paling tidak, kita berusaha untuk menggantikan *value judgement* ekonomi non-Islam (dalam hal ini ekonomi Kapitalis) dengan *value judgement* Islam dan menambah stock ekonomi mengenai ketegasan positif dengan ketentuan Islam, selanjutnya menjalankan konsekwensi-

¹⁶⁰ Q.S. Ali Imran; 140

¹⁶¹ Imamudin Yuliadi, Metodologi Ekonomi Islam, Op-cit, h. 85

konsekwensinya; lebih jauh lagi kita mempunyai semangat dan memang dan memang “harus” untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikannya sedini mungkin.

Selanjutnya jika keberadaan (ekonomi Islam) benar-benar diakui sebagai sebuah sistem ekonomi yang mandiri, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi, tentunya hal ini akan mudah dilakukan kalau teori ekonomi Islam itu sudah memiliki *bentuk standard dan isi yang jelas serta teruji* dalam pelaksanaannya, dan mampu memecahkan problem ekonomi yang ada di tengah-tengah kemampuan teori-teori ekonomi yang sudah ada. Tetapi pada dasarnya kita harus memulai dari sekarang untuk terus mengedepankan semangat untuk menerapkan ekonomi Islam (dengan memulainya dari diri kita sendiri), sebab menurut hemat penulis sistem ekonomi Islam ini akan terus berkembang (dinamis) seiring dengan perubahan waktu dan munculnya kesadaran masyarakat bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang jauh dari norma-norma yang dianjurkan agama.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam¹⁶²

a. Kebebasan perorangan

Seseorang mempunyai hak kebebasan yang sepenuhnya untuk membentuk suatu keputusan dan berpendapat yang dianggap penting dalam suatu negara Islam. Sebab dengan adanya kebebasan tersebut individu muslim akan dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam

¹⁶² Afzalur Rahman, Doktrin iikonomi Islam, Jakarta: Dana Baku Wakaf,1995, JilidI,h. 2

menikmati kesejahteraan dan tidak akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak terhadap harta kekayaan

Islam mengakui hak perseorangan untuk memiliki harta kekayaan, sekalipun demikian Islam memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat pada umumnya.

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara individu-individu, tetapi Islam tidak memberikan perbedaan itu menjadi meluas, ia mencoba menjadikan ketidaksamaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Jaminan sosial

Setiap perorangan mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan untuk memperoleh kebutuhannya masing-masing, setiap warga negara mendapat jaminan. Hal demikian itu sudali menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi hajatnya sesuai dengan prinsip „hak untuk hidup“. Apabila kebutuhan pokok setiap warga negara telah terpenuhi, maka akan terjadi persamaan yang sepenuhnya.

e. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang perorangan menumpuk kekayaan secara berlebihan dan perlu diambil langkah-langkah untuk melarang perbuatan yang tidak baik itu supaya tidak terjadi dalam sebuah negara.

f. Larangan terhadap organisasi anti sosial

Sistem ekonomi Islam melarang seluruh praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dimasyarakat seperti berjudi, minum arak, riba, menimbun harta, pasar gelap dan sebagainya. Kesejahteraan perorangan dan masyarakat Islam mengakui kesejahteraan perorangan dan sosial masyarakat yang saling membantu satu sama lainnya, bukannya yang saling berkompetisi dan bertentangan antar mereka.¹⁶³

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa Islam mendukung dan menggalakkan kesamaan kehidupan sosial, walaupun tidak menganjurkan kesamaan dalam ekonomi, sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Bahkan sangat penting sekali bagi setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Sehingga terjadinya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan baik. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha meredakan konflik perbedaan dalam ekonomi sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada saat ini terdapat dua sistem ekonomi yang menguasai dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sebagai akibat dari penjajahan Barat terhadap dunia Islam baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka kedua sistem ekonomi itu telah dipakai oleh sebagian negara-negara Islam, kedua sistem itu masing-masing memiliki konsep yang bertolak belakang. Sosialisme memiliki konsep ekonomi

¹⁶³ Afzalur Rahman, Op-cit , h. 10.

kolektif, sedangkan kapitalis memiliki konsep kebebasan individu (liberal). Di samping perbedaan yang bertolak belakang, keduanya mempunyai persamaan, yaitu aktivitas perekonomiannya memiliki watak matérialisme murni.¹⁶⁴

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berketuhanan. Karena itu aktivitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat material, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Sendi dari aspek spiritual adalah kesadaran individu muslim akan keta'atan kepada Allah SWT, dengan kata lain, manusia itu disamping berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar, juga ia berhubungan dengan Allah SWT. A.M. Saefuddin¹⁶⁵ menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan “*triangle*” antara Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya. Allah dalam hal ini berada pada puncak triangle tersebut, sedangkan manusia dan alam sekitarnya berada pada kedua sudut triangle tersebut.

Dengan menempatkan Allah SWT pada puncak atas, maka segala aktivitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan didalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, baik yang menyangkut dengan masalah produksi, distribusi maupun konsumsi.

Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi, dalam mendistribusikannya atau mengkonsumsinya dengan jalan yang bathil, kecuali dengan aktivitas yang *safa*

¹⁶⁴ Muhammad Syaouqi Al-Fanjari, Ekonomi Islam Masa Kini, Bandung: Mizan, 1988, Penerjemah Husaini, h. 60.

¹⁶⁵ A.M. Saefuddin, Studi Ni/ai-ni/ai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Media Dakwah, 1984, h. 3

dan sehat berdasarkan kebebasan berkehendak serta dibarengi dengan kesukarelaan masing-masing pihak, tidak berbuat curang dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Dengan demikian terlihatlah bahwa Islam telah menyelesaikan masalah bagaimana agar manusia dapat memanfaatkan (mengelola) kekayaan yang ada, dan inilah yang sebenarnya dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat.

Karena itu dalam membahas masalah ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola dan mendistribusikannya. Dengan kemudahan hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan dan mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah manusia.¹⁶⁶

Hak milik merupakan masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia memperoleh hak milik tersebut dan sejauh mana hak pemilikan itu berada pada manusia serta konsekuensinya yang timbul dari kepemilikan tersebut. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kepemilikan seseorang terhadap suatu benda bersifat absolut, sedangkan dalam sistem sosialis hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Karena itu dalam sistem ekonomi sosialis kepemilikan itu diatur oleh negara dan secara individual tidak ada hak kepemilikan.

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, prinsip-prinsip kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah : Pemilik mutlak adalah Allah SWT.

¹⁶⁶ Taqiyuddin An- Nabhani, Op-cit, h. 61

Semua sumber ekonomi adalah milik Allah SWT, hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT Qur'an Surat al-Baqarah ayat 29 : *“Dia lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu ...”*. dan ayat 284 : *“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi yang diberikan kepada manusia untuk dikelola”*.

Dengan demikian kepemilikan bukan berarti penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya terbatas pada kemampuan untuk memanfaatkannya. Kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi dibagi menjadi tiga macam, yaitu kepemilikan individu (*Private property*), kepemilikan umum (*Collective property*) dan kepemilikan negara (*Stateproperty*).

Salah satu contoh kepemilikan individu telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Yahya Ibn Urwah R.A. :

“Barang siapa yang memakmurkan tanah kosong yang bukan menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut”. (H.R Abu Dawud)¹⁶⁷

Sedangkan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Khaddasy R.A dari salah seorang shahabat Muhajirin, Nab SAW, R.A. sebagai berikut :

“Semua orang miskin berserikat dalam tiga sumber ekonomi, yaitu rumput, air dan api”. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).¹⁶⁸

¹⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Sy^hats, Sunan Abi Dawud, Darul-fkr, t.t. jilid III h. 178.

¹⁶⁸ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Sy^hats, Sunan Abi Dawud, h. 278

Termasuk ke dalam harta milik umum (negara) ini adalah baitul mal kas negara) yang bersumber dari pajak usaha (kharaj), *jisyah* (pajak jiwa), *ghanimah* dan *fa'i* (rampasan perang) dan lain sebagainya.

g. Kepemilikan itu terbatas

Kepemilikan manusia terhadap sumber ekonomi itu terbatas hanya selama hidupnya. Jika telah meninggal, maka harta itu harus didistribusikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang menurut An Nabhani¹⁶⁹ pembatasan kepemilikan itu dengan menggunakan mekanisme tertentu, terlihat pada beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengambilan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi milik orang lain.
- 2) Dengan cara menentukan mekanisme pengelolaannya.
- 3) Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu.
- 4) Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi tertentu (hak sufab).
- 5) Dengan cara mensuplai orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan syara' (zakat).

¹⁶⁹ Taqiyuddin An- Nabhani, Op-cit, h. 69.

Sebab-sebab Timbulnya Kepemilikan

Kepemilikan atas suatu harta mempunyai sebab-sebab syari'ah yang telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab-sebab itu, secara garis besarnya terjadi lima sebab, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sebab bekerja atau usaha, seperti jual-beli, broker/makelar, kontrak tenaga kerja, dan sebagainya.
- 2) Harta yang didapat karena kematian pemilik harta, seperti warisan.
- 3) Harta yang diperoleh dengan jalan adanya ketentuan syara' bagi orang yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi hajatnya, seperti zakat, infaq dan shadaqah.
- 4) Harta yang diperoleh dari pemberian negara, seperti pembagian hasil ghanimah
- 5) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau jasa, seperti hibah dan hadiah.

Sistem Ekonomi Menurut Islam

Sistem ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal itu dapat di lihat jelas pada pendirian Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak tersebut diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akherat, jiwa dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Diantaranya Al-Qur'an mengungkapkan dalam surat Al-Qashash, ayat 77 sebagai berikut :

“Dan usahakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu akan kesenangan negri akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan

duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana halnya Allah SWT berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka orang-orang yang berbuat keusakan “. ¹⁷⁰

Islam juga bersikap ditengah-tengah (pertengahan) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menganiaya (mendzalimi) masyarakat, khususnya kaum Dhu'afa (lemah), sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Islam tidak menganiaya (mendzalimi) hak perorangan, sebagaimana dilakukan oleh kamu sosialis, terutama paham komunis, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, dan Islam juga meminta mereka (mukalaf) melaksanakan kewajiban masing-masing. Karena itu Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijakan. ¹⁷¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di antara tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- a. Mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah SWT, dengan segala kapital yang diberikan kepada makhluk-Nya.
- b. Dianjurkan memperjuangkan nasib sendiri mencari rezeki dan hak milik dengan tidak melupakan hari akhirat, tempat kembali semua makhluk-Nya.
- c. Berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana halnya Allah SWT berbuat baik kepada makhlukNya dengan tanpa dihitung-hitung.
- d. Dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

¹⁷⁰ Q.S. Al Qashah, 77

¹⁷¹ Yusuf Qardlahi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Penerjemah; Zainal Arifin, h. 69-71

BAB VI

KONSUMSI, PRODUKSI, DAN DISTRIBUSI DALAM SISTEM EKONOMI

Dalam sistem ekonomi kapitalis (klasik),¹⁷² pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*¹⁷³ (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan equilibrium dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang

¹⁷² Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle., N.Y : Arlington House, 1966

¹⁷³ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

(*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar.

Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max¹⁷⁴ menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha.

Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus

¹⁷⁴ Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

berperan signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar.¹⁷⁵

Menurut paham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah “karyawan” yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang sistem perekonomian tersebut, bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara mengatur harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang

¹⁷⁵ Adiwirman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, TIII, Jakarta, 2003, hlm. 76

berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi.¹⁷⁶ Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

: غلا السعر فسعر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر و[]ى أرجوا أن ألقى ربي وليس
أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها اياه بدم ولا مال (رواه الدارمی)

¹⁷⁶ Adiwarmar Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , h. 76.

“*Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”*¹⁷⁷

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga, ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah).¹⁷⁸

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh

¹⁷⁷ Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, Darul Fikri Beirut , tt., hlm 78

¹⁷⁸ Adiwarmar Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , h, 78

ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Sedang intervensi dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.¹⁷⁹ Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said bin Said Ibnul 'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Makkah.

Kajian mengenai mekanisme pasar telah banyak di bahas oleh para ulama klasik jauh sebelum para ekonom Barat membahasnya. Ulama yang pertama kali membahas mekanisme pasar secara empirik adalah Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798). Dia telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Adiwarmar Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , h, 78

¹⁸⁰ Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1979, hlm. 48.

Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.

Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya persediaan barang sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga, dan sebaliknya persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, “Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.¹⁸¹

Pernyataan tersebut adalah benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.

Dalam mempertahankan pendapat ini Abu Yusuf mengatakan bahwa ada beberapa variabel dan alasan lainnya yang bisa mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan secara detail, mungkin karena alasan-alasan penyingkatan.¹⁸² Mungkin variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang.

Dalam konteks ini Abu Yusuf mengemukakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang rendah dan mahalnya harga barang. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan

¹⁸¹ Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma‘arif, 1979, hlm. 48

¹⁸² Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma‘arif, 1979, hlm. 48

karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah.¹⁸³

Dalam hal ini Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi berkomentar, Telaahan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga murah.¹⁸⁴

Dengan demikian meskipun Abu Yusuf tidak mengulas secara rinci tentang mekanisme pasar (yakni tentang variabel-variabel lain), Namun pernyataannya tidak menyangkal pengaruh supply dan demand dalam penentuan harga.

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah melakukan kajian yang menyeluruh tentang permasalahan mekanisme pasar. Ia menganalisa masalah ini dari perspektif ekonomi dan memaparkan secara detail tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga.

Jadi, Sekitar lima abad sebelum kelahiran Adam Smith (1776), Ibnu Taymiyah (1258) telah membicarakan mekanisme pasar menurut Islam, Melalui konsep teori harga dan kekuatan *supply and demand* dalam karya-karyanya, seperti yang termuat dalam kitab Al-Hisbah. Padahal Ibnu Taymiyah sama sekali belum pernah membaca buku terkenal *The wealth of Nation*, karangan Bapak ekonomi Klasik, Adam Smith, karena

¹⁸³ Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1979, hlm. 48.

¹⁸⁴ Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, Economic Thought of Abu Yusuf, , Aligarh, In Fikri wa Najjar, vol. 5 No 1, Januari 1964, h.86

memang Ibnu Taymiyah lahir lima ratus tahun sebelum Adam Smith.¹⁸⁵

Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Ibnu Taymiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).¹⁸⁶

Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar didalam bukunya “Al-Hisbah fil Islam”. Beliau mengatakan, bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.¹⁸⁷

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.¹⁸⁸

¹⁸⁵ Ibnu Taymiyah, Majmu‘ Fatawa Ibnu Taymiyah, jilid VIII, hlm. 583

¹⁸⁶ Ibnu Tamiyah, Al-Hisbah fil Islam, Kairo, Mesir, tt, hlm. 76

¹⁸⁷ Ibnu Tamiyah, Al-Hisbah fil Islam, h.76

¹⁸⁸ Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah fil Islam, p.24 dan Majmu‘ fatawa, VIII : 583).

Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. (kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil/zalim.¹⁸⁹

Kelangkaan minyak tanah misalnya, bisa terjadi disebabkan ulah oknum-oknum tertentu dengan mengekspor keluar negeri, sehingga pasar minyak tanah di dalam negeri menjadi langka. Selanjutnya Ibnu Taymiyah menyatakan, penawaran bisa dari produksi domestik dan impor. Terjadinya perubahan dalam penawaran, digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun), sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen.¹⁹⁰

Di sini Ibnu Taymiyah benar-benar telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga. Besar kecilnya kenaikan harga, tergantung pada besar kecilnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah atau sunnatullah¹⁹¹ (hukum *supply and demand*). Adam Smith menyebutnya dengan istilah *invisible hands*.

Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain besar kecilnya

¹⁸⁹ Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah fil Islam , h.24

¹⁹⁰ Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah fil Islam , h.24

¹⁹¹ Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatawa , op.cit, XXIX : h. 523-525.

jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut, selera, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, dan lain sebagainya.

Ibnu Taymiah membedakan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yakni tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan zalim dari penjual, misalnya penimbunan (iktikar).

Pada mulanya, titik equilibrium terjadi pada titik A dengan harga P_1 dan jumlah Q_1 . Namun karena terjadi inefisiensi produksi, maka terjadi kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini pergeseran kurva supply dari S_1 menjadi S_2 . Karena pergeseran ini tercipta titik equilibrium baru pada titik B. Pada titik B ini terjadi penurunan kuantitas yang ditawarkan dari Q_1 menjadi Q_2 , dan pada saat yang sama terjadi kenaikan harga dari P_1 menjadi P_2 .

Selanjutnya Ibnu Taymiah mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi harga adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan, atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan dan diskonto pembayaran tunai. Demand terhadap barang seringkali berubah. Perubahan tersebut dikarenakan jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, Ibnu Taymiah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Jika kebutuhan besar, harga akan naik, jika kebutuhan kecil maka harga akan turun.

Pada mulanya titik equilibrium terjadi pada saat E1 dengan harga P1 dan kuantitas Q1. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Dan bila pada saat yang sama penawaran berkurang, maka terjadi pergeseran kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Naiknya permintaan dan turunnya penawaran ini menyebabkan terbentuknya titik equilibrium baru E2, dengan harga yang lebih tinggi P2 dan kuantitas yang lebih sedikit Q2.

Selanjutnya, harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.¹⁹²

Selanjutnya Ibnu Taymiyah memaparkan kredit dengan penjualan dan pengaruhnya terhadap harga. Ketika menetapkan harga, penjual memperhitungkan resiko dan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Ia juga menjelaskan kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai. Argumen Ibnu Taymiyah, bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya terhadap intensif, disinsentif, ketidakpastian dan resiko yang terlibat dalam transaksi terhadap analisis ekonomi, tidak saja bagi orang yang hidup di zaman Ibnu Taymiyah, tetapi juga pada masa kini.

¹⁹² Ibn Taimiyah, "Al-Hisbah fil Islam", Kairo, 1976, hal. 16

Ibnu Taymiyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen.¹⁹³ Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut dengan harga yang adil.

Lebih jauh, bila ada unsur-unsur monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli. Maka dalam hal ini, intervensi pemerintah menjadi keharusan.

Seperti yang telah disebutkan, ketentuan ini hanya berlaku jika pasar dalam keadaan normal/adil. Akan tetapi apabila pasar tidak dalam keadaan sehat atau terjadi di dalamnya tindak kezaliman, seperti adanya kasus penimbunan, monopoli, riba, penipuan, dan lain-lain. maka menurut pandangan Ibn Taimiyah, di sinilah letak peranan pemerintah yang sangat urgen untuk melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen, dengan tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi kepentingannya oleh pihak lain.

Jelaslah di sini, bahwa menurut konsep Ibn Taimiyah, pemerintah hanya memiliki kewenangan menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di dalam pasar. Sedangkan di dalam pasar yang adil (sehat), harga diserahkan kepada

¹⁹³ Ibn Taimiyah, "Al-Hisbah fil Islam", h.25

mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan *supply dan demand*.¹⁹⁴

Sedangkan al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep *supply and demand*. Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya.

Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.”¹⁹⁵

Pada tingkat harga P_1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar Q_{s1} , sementara jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q_1 . Dengan demikian, petani tidak mendapatkan cukup pembeli. Untuk mendapatkan tambahan pembeli ia menurunkan harga jual produknya, dari P_1 menjadi P_2 , sehingga jumlah pembelinya naik dari Q_1 menjadi Q_2 . Sementara untuk kurva permintaan, “yang turun dari atas ke

¹⁹⁴ Ibn Taimiyah, “Al-Hisbah fil Islam”, h.25

¹⁹⁵ Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid III, hlm. 227

kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.¹⁹⁶

Awalnya harga yang diminta petani adalah sebesar P_1 . Pada harga ini jumlah permintaan dan penawaran terhadap harga produk petani tersebut adalah sebesar Q_1 . Dengan menurunnya jumlah permintaan dari Q_1 menjadi hanya sebesar Q_2 (yakni dengan bergesernya kurva permintaan D_1 ke kiri bawah menjadi kurva D_2 , maka tingkat harga akan turun pula dari P_1 menjadi P_2 . Dengan demikian, harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum *supply and demand*, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.”¹⁹⁷

¹⁹⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 87

¹⁹⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, h.73

Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (ribh), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.¹⁹⁸ Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun, demikian pula sebaliknya.

Tambahan pemikiran al-Ghazali lainnya adalah mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme.

Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat agaknya adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta'awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika

¹⁹⁸ Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin , h.73

ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.¹⁹⁹

Selain Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas teori harga adalah Ibnu Khaldun. Di dalam Al-Muqaddimah, ia menulis secara khusus bab yang berjudul, "Harga-harga di Kota". Ia membagi jenis barang kepada dua macam, pertama, barang kebutuhan pokok, kedua barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.²⁰⁰

Supply bahan pokok penduduk kota besar (QS2), jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk kota kecil Qs1. Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah (P2). Sementara itu supply bahan pokok di kota kecil, relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya lebih mahal (P1).

Yang menjadi catatan disini, adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori *supply and demand* sebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga

¹⁹⁹ Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin , Jilid IV, 10

²⁰⁰ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000, 421-423

keseimbangan. Pada sisi permintaan demand, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran (supply) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.

Selanjutnya ia menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taymiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

Masih berkaitan dengan teori *supply and demand*, Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (demand) konsumen.

Apabila dibandingkan dengan Ibnu Taymiyah yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sedangkan Ibnu Taymiyah menjelaskannya secara implisit saja.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep

apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun lebih fokus pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taymiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.

Oleh karena itu, terlihat bahwa Ibnu Taymiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga dengan menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme pasar berjalan normal, pemerintah dianjurkan melakukan kontrol harga.

Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, maka Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku *The Economic Enterprise in Islam*, menulis, “Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen.”²⁰¹

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana

²⁰¹ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Islamic Publication, Ltd, Lahore, terj. Anas Sidik, Bumi Aksara Jakarta, hlm. 82

keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.²⁰²

Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan produser di pasar, barang yang ada bersifat heterogen (sangat variatif) dan faktor produksi bergerak secara bebas. Adalah satu hal yang sulit bagi kedua asumsi tersebut untuk direalisasikan dalam kenyataan di pasar.²⁰³ Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar.

Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal.

Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.

²⁰² Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Sidik, 83

²⁰³ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Sidik, 84

3. Jika perlu, campur tangan negara sangat urgen diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.²⁰⁴

Intervensi Pemerintah

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi.²⁰⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah,

²⁰⁴ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Sidik, 85

²⁰⁵ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar*, Nurinsani, Jakarta, 2003, hlm.46

memandang perlu keterlibatan (*intervensi*) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan: Menghilangkan kemiskinan.

Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak memuji adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis: “Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (*iqta*“) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah”.²⁰⁶

²⁰⁶ Ikhwan Hamdani, Sistem Pasar, h.46

Regulasi Harga dan Pasar

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa Rasulullah SAW sendiri sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadits bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya (*musa'ir*). Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah atau hak miliknya”.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali mengatakan: “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapa pun yang mereka sukai”. Ibnu Qudamah mengutip hadits tersebut di atas dan memberikan dua alasan tidak diperkenankan mengatur/menetapkan harga. Pertama: Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua: menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (kezaliman) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang, yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia bersepakat dengan pemiliknya.²⁰⁷

Ibnu Qudamah selanjutnya mengatakan bahwa ini sangat nyata apabila adanya penetapan, dan regulasi serta pengawasan harta dari pihak pemerintahan akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang semakin melambung (mahal).

²⁰⁷ Ikhwan Hamdani, Sistem Pasar, h.46

Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dengannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya diluar harga yang diinginkan. Dan para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dengan tidak dipuaskan keinginannya, karena harganya melonjak mahal/tinggi. Harga akan meningkat dan kedua belah pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang dagangan mereka, dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tak bisa dipenuhi dan dipuaskan. Inilah alasan mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah.²⁰⁸

Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai.

Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari penjual barang pun atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap.

²⁰⁸ Dr. A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, "Hukum Ekonomi Islam" 1999, Jakarta, Pustaka Firdaus, hal. 101-102.

Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompoten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.²⁰⁹

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu, negara bertanggungjawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai tukar barang. Karena itu otoritas ekonomi (negara) harus mengeluarkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan mata uang untuk tujuan bisnis. Ibnu taimiyah sangat jelas memegang pandangan pentingnya kebijakan moneter bagi

²⁰⁹ Ibn Taimiyah, "Al-Hisbah fil Islam", h.30

stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap upaya yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi.²¹⁰

Peranan Lembaga Hisbah

Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan hisbah. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan diawal, memandang penting arti dan peran lembaga hisbah (pengawasan pasar). Para muhtasib (orang-orang yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar.

Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang. Namun, tim inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, ihtikar maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Terjunnya Rasulullah Saw, segera direspons positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan paganis ada tidak berdaya menolak imbauan Rasul. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa nabi

²¹⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Darul Fikri, Beirut, 1988, hlm.44

cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.

Setelah Rasulullah Saw wafat, peranan lembaga hisbah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika khalifah Umar, lembaga hisbah lebih agersif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak, akan menjadi potensi ketidak seimbangan harga yang tentu merugikan masyarakat konsumen.

Menyadari potensi resiko ini, para khalifah yang empat memandang penting peran lembaga hisbah. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitaasi dan kecurangan.

Yang perlu dicatat, adalah keberhasilan lembaga hisbah dalam kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga hisbah yang commited terhadap missi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima risywah (suap).

Lebih lanjut di dalam salah satu bagian dari bukunya “Fatawa”, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut

persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi demand dan supply sebagai berikut :

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuannya membayar.
5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah

ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggukannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya.²¹¹

Mengenai etika perilaku produsen pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila aktivitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at Islam.

Berikut ini diuraikan beberapa hal yang terkait dengan pola produksi di bawah pengaruh semangat Islam:

1. Barang dan jasa yang haram tidak diproduksi dan dipasarkan produsen muslim tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan dan usaha-

²¹¹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni , h.44

usaha maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).

2. Produksi barang yang bersifat kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif.
3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan, memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran, sehingga mengakibatkan naiknya harga semen di pasar. Sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan. Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan

ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Akan tetapi seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah dari padanya.

Seorang pengusaha/pedagang muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar, juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi kegiatan produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebajikan perusahaannya.
3. Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip syari'at Islam.²¹²

Sedangkan etika perilaku konsumen, pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi²¹³ (1991:94) dengan istilahnya "Rasionalisme Ekonomi". Akan tetapi kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas, tanpa batas, tetapi kepuasan

²¹² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, h.44

²¹³ Ibn Taimiyah, "Majmu" al-Fatawa Ahmad bin Taimiyah vol 29", Riyadh, 1387 H, hal. 469

yang mengacu kepada semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syari'at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang penggunaannya dilarang oleh syari'at Islam. Misalnya: tidak mengkonsumsi minuman keras, makanan haram, prostitusi, hiburan yang tidak senonoh dan barang serta jasa yang dilarang menurut ajaran Islam. Dengan perilaku konsumen yang demikian akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.
- b. Cara hidup yang tidak boros. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari'at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak timbul kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.
- c. Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Seorang muslim yang berkeberuntungan memiliki kelebihan harta,

tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di dalam setiap harta seorang muslim itu ada hak fakir miskin (masyarakat) yang harus ditunaikan (adz Dzariaat: 19).

Seorang muslim yang mampu berkewajiban mendistribusikan hartanya kepada yang berhak menerimanya dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini lazim dikenal dengan istilah zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.

- d. Dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
- e. Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.
- f. Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Maksudnya ialah seorang konsumen bekerjasama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan. Sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan. Seperti pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain.²¹⁴

²¹⁴ A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah, terj. Anshari Thayyib, Bina Ilmu Surabaya, 1997, hlm. 104-105

Perencanaan Ekonomi.

Pengembangan dan kemandirian ekonomi merupakan prasyarat penting bagi stabilitas negara. Sebuah negara yang kurang berkembang dan tak mandiri, sangat rentan menghadapi rekayasa kekuatan asing, dan kondisi dalam negerinya mudah goyah. Tak ada satu pemerintah pun menolak kebutuhan pengembangann ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapainya adalah melalui perencanaan ekonomi. Jika kegiatan sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan supply yang layak, yang hanya bisa dilakukan jika negara menaruh perhatian atas kegiatan ekonomi dan siap siaga untuk meningkatkan produksi di suatu wilayah yang membutuhkan.

Ibnu Taimiyah tak membedakan antara perencanaan produksi untuk barang dan jasa. Pandangannya bersifat umum. Tetapi secara khusus dia menyebutkan apa yang diistilahkan dengan kebutuhan barang sosial (publik), yang kenyataannya tak pernah mungkin dipenuhi kebutuhannya oleh setiap individu. Pemenuhan kebutuhan barang seperti itu merupakan kewajiban permanen bagi negara. Negara harus selalu siap mengambil langkah kebijakan, jika perlu menggunakan tekanan. Tak diragukan lagi, seperti pemikir muslim lainnya, Ibnu Taimiyah menggambarkan dengan tegas, bahwa pemenuhan barang-barang kebutuhan publik menjadi kewajiban utama bagi negara.

Aktifitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infra-struktur, misalnya sistem transportasi dan komunikasi,

membangun jaringan jalan, jembatan, kanal dan sebagainya, membutuhkan biaya sangat tinggi dan masa pembiayaan sangat panjang. Karenanya investor swasta tak mungkin menanggungnya. Jadi hal itu juga harus menjadi kewajiban negara juga untuk menanggulangnya. Negara juga harus mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan penduduk agar mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Begitu pula negara juga berhak untuk mempekerjakan seseorang yang tak memiliki keterampilan apa-apa di kantor publik, jika memang hanya tenaga kerja seperti itu sudah tersedia, hanya saja dibutuhkan pelatihan dan persiapan agar mereka mampu memenuhi kualifikasi pokok yang dibutuhkan untuk kinerja negara dan urusan publik lainnya.

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dikemukakan sebelumnya menjadi jelas bahwa tak ada tujuan dari pemikiran Ibnu Taimiyah untuk meniadakan jasa usaha individual dan melenyapkan kedudukan pasar. Tetapi juga tidak mendukung penempatan negara sebagai pemegang keputusan tunggal (otoritarian) dalam mengalokasikan seluruh sumber, produksi dan distribusi barang atau melakukan pengawasan yang tersentral atau seluruh aktifitas ekonomi. Apa yang ia maksudkan adalah jika mekanisme pasar tidak mampu bekerja optimal dalam usaha memenuhi kebutuhan penduduk, dan ketika penduduk tidak bisa menggunakan seluruh sumber secara optimal, negara harus mengambil peran aktif dan secara sadar menetapkan prioritas dan menyiapkan sarana/prasarana untuk membangun akses (bagi masyarakat) ke sumber ekonomi khususnya jika mekanisme pasar telah gagal menuju ke sana.

Tentu saja, dalam mempertimbangkan prioritas harus diputuskan melalui musyawarah dengan sejumlah ahli ekonomi yang ada, yang hal itu merupakan kewajiban negara. Musyawarah itu harus dilaksanakan sebagai dasar pengembangan rencana ekonomi. Perencanaan yang dibuat melalui musyawarah dan konsensus, akan lebih mampu menciptakan harmoni dari seluruh kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kerjasama positif antar penduduk.²¹⁵

Ibnu Taimiyah memiliki interpretasi yang berbeda dari penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah terhadap sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan peristiwa melambungnya harga pada zaman belia.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah peristiwa di dalam hadits tersebut adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Hal ini bukan merupakan dalil yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang wajar. Masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa hadits itu menunjukkan adanya kenaikan harga disebabkan karena kekuatan pasar atau terjadi sesuai dengan mekanisme pasar yang ada ketika itu, dan bukan karena disebabkan oleh kezaliman dari pasar.

Ia (Ibnu Taimiyah) membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antar dua orang. Contoh kasus pertama adalah kasus pembebasan budak. Rasulullah SAW mendeskripsikan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan

²¹⁵ Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, h.108

tanpa ada tambahan atau pengurangan, setiap orang harus diberi bagian yang layak dan budak itu harus dibebaskan.²¹⁶

Kasus yang kedua menceritakan ketika terjadi perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki satu pohon yang sebagian cabang-cabangnya tumbuh ditanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon diatas tanahnya yang digarap sangat mengganggu. Ia (pemilik tanah) mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual sebagian cabang pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil darinya. Orang tersebut (pemilik pohon) ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia (pemilik tanah) memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.²¹⁷

Setelah menceritakan dua kasus yang berbeda tempat itu dalam bukunya “Al-Hisbah”, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa inilah dalil yang kuat untuk menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan harga (regulasi). Kemudian ia melanjutkan penjelasannya, bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu dua orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal yang sama ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu.²¹⁸

²¹⁶ Surahwardi Lubis, “Hukum Ekonomi Islam” Sinar Grafika Jakarta 2000, hal. 23-27.

²¹⁷ Ibn Taimiyah, “Siyasah Syar’iyah”, hal. 81

²¹⁸ Ibn Taimiyah, “Siyasah Syar’iyah”, hal. 81

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga? Menurut Ibnu Taimiyah adalah karena pada waktu itu tidak ada kelompok yang secara khusus, melainkan hanya menjadi pedagang/penjual yang berada di kota Madinah. Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualannya tidak bisa diidentifikasi secara khusus, kepada siapa penetapan harga itu akan diberlakukan? Itu sebabnya, penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis, atau melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini mengindikasikan hal tersebut tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang tidak akan berarti apa-apa atau tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di kota Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kontrol apapun yang dilakukan atas barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan *supply* dan situasi memburuk. Jadi Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi.²¹⁹

Dari keterangan di atas tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang barang atau para perantara kegiatan ekonomi itu berusaha menaikkan harga melalui kezaliman (tidak adil). Jika seluruh kebutuhan akan barang menguntungkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Tidak membatasi impor dapat diharapkan bisa meningkatkan supply dan menurunkan harga.

²¹⁹ Ibnu Taymiyah Al-Hisbah, h.18-23.

BAB VII

PERDAGANGAN BEBAS DAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI

Sistem pasar bebas sebagai sistem sosial masyarakat modern, dalam realitasnya belum sepenuhnya menopang terhadap tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.²²⁰ Hal ini seakan bertolak belakang dengan teori *Invisible Hand* Adam Smith yang menjadi landasan sistem pasar bebas. Dalam satu sisi, tidak bisa di pungkiri bahwa sistem pasar bebas telah membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan pesat, namun di sisi yang lain pertumbuhan tersebut tidak di barengi dengan pemerataan sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial.²²¹

Sistem pasar bebas nyata-nyata hanya bisa di nikmati oleh kalangan pemilik modal saja, sementara kalangan miskin harus merelakan tenaganya untuk di jual kepada kalangan pemilik modal. Oleh karena itu, dengan fakta ketimpangan yang dilahirkan sistem pasar bebas, patutlah kiranya eksistensi sistem pasar bebas sebagai mekanisme distribusi pendapatan dipertanyakan.²²²

Dari hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif atas ketidak efisienan sistem pasar bebas dalam sistem

²²⁰ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²²¹ Arief Ramelan Karseno, Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, ed. Dr. Mohtar Mas"oed, Yogyakarta: UII Press, 1999

²²² Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionisme, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

kapitalisme. Solusi tersebut adalah dengan lebih memberikan ruang pada pemerintah sebagai regulator. Hal ini penting, sebab dengan otoritas pemerintah yang jelas, ketimpangan dalam mekanisme pasar dapat terminimalisasi.

Aktualisasi pemerintah di ruang publik tersebut didasarkan pada prinsip Tauhid, al-Adl, dan Khilafah sebagai dasar dalam interaksi ekonomi. Dalam hal ini, peran pokok pemerintah adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Adam Smith²²³ sistem sosial masyarakat modern adalah sistem pasar bebas atau dalam istilah Adam Smith di sebut dengan sistem kebebasan kodrati dan keadilan. Sistem ini, tidak terlepas dari akumulasi ketidak tuntasannya sistem sebelumnya yakni merkantilisme dan fisiokrat yang dipandang Adam Smith tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Adam Smith mencoba melahirkan gagasan baru yang bertitik tolak pada pandangan bagaimana kesejahteraan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.

Dari sini, Adam Smith menyatakan bahwa jika setiap individu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya, maka kesejahteraan akan dapat terealisasi.²²⁴ Hal tersebut merupakan inti dari teori Invisible Hand yang digagasnya. Adam Smith begitu yakin dengan kebebasan individu, sebab dengan bimbingan tangan gaib (*Invisible*

²²³ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²²⁴ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

Hand) kebebasan individu tersebut, akan melahirkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam kenyataannya sistem ini hanya melahirkan ketimpangan sosial. Kepercayaan terhadap individu yang begitu besar terkhusus bagi pemilik modal pada akhirnya melahirkan relasi sosial yang dalam istilah Karl Marx sebagai Eksploitasi dan Alienasi (keterasiangan).²²⁵

Dewasa ini, di mana kapitalisme semakin menggelobal yang di iringi dengan mobilisasi modal kakap, makin membuat kelas tak bermodal atau miskin termarginalkan dalam gilda-gilda kapitalisme. Minimnya peran pemerintah dalam interaksi ekonomi makin memperparah nasib kelas ini, pada hal salah satu tugas pemerintah adalah melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar tiap warganya. Namun, dalam relasi sistem pasar bebas kapitalisme, hal tersebut seakan tereduksi dengan kepentingan korporat-korporat lokal maupun transnasional.²²⁶

Menurut Kevin Danaher, dalam bukunya yang bertajuk “10 alasan bubarkan IMF dan Bank Dunia” menyatakan bahwa globalisasi pasar yang getol dikampanyekan oleh IMF dan Bank Dunia dalam kenyataannya menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Menurut The United Nations Development Program (UNDP) sebanyak 20 % kaum kaya di seluruh dunia telah menguasai 86% sumber daya dunia, sedangkan kaum miskin dan menengah diseluruh dunia sebanyak 80% menikmati 14% saja kekayaan dunia.²²⁷

²²⁵ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

²²⁶ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003

²²⁷ Kevin Danaher, *10 Reason Abolish IMF And World Bank*, terj. AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelaras, 2005

Fakta di atas adalah satu di antara fakta-fakta ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi pasar bebas. Fakta lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah seperti kerusakan lingkungan, relasi sosial dan moralitas. Dari hal ini, patutlah kiranya jika saat ini gerakan resistensi terhadap sistem pasar bebas sebagai instrumen distribusi pendapatan muncul kepermukaan.

Berangkat dari hal ini. Islam melalui system ekonominya mencoba menawarkan solusi alternatif atas kebuntuan system pasar bebas sebagai instrument distribusi pendapatan. Makalah ini, bermaksud untuk menelaah gagasan sistem pasar bebas yang kemudian mendekonstruksikannya dengan gagasan ekonomi Islam sebagai formula alternatif.

Sejarah Sistem Pasar Bebas (Kerangka Teoritis)

Doktrin pasar bebas pada awal mulanya berangkat dari gagasan seorang ekonom Inggris pada abad 18 yakni Adam Smith, yang gelisah terhadap sistem perekonomian dominan saat itu yakni merkantilisme dan fisiokrat yang di anggap tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.²²⁸

Dalam *The Wealth of Nations* sebagai karya agungnya, Adam Smith menolak pandangan kaum fisiokrat tentang pentingnya lahan dalam mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengabaikan sistem perburuhan dan pembagian kerja.²²⁹ Menurut Adam Smith, buruh merupakan

²²⁸ Arief Ramelan Karseno, *Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar*, dalam *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, ed. Dr. Mohtar Mas'od, Yogyakarta: UII Press, 1999

²²⁹ Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenanda Media, 2005

proritas tinggi dan pembagian buruh kedalam beberapa unit kerja, akan berakibat pada kenaikan yang signifikan terhadap hasil produksi. Smith memakai contoh dengan pembuatan jepitan. Satu pekerja bisa membuat dua puluh pin sehari. Tapi jika sepuluh orang dibagi menjadi delapan belas langkah yang diperlukan membuat sebuah jepitan, mereka bisa membuat 48.000 jepitan dalam sehari.²³⁰

Selain itu, Adam Smith juga menolak pandangan kaum merkantilisme yang menyatakan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan terwujud hanya dengan jalan perdagangan ekspor impor logam mulia (Emas dan Perak). Dengan kata lain, semakin besar cadangan logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin makmur pula kehidupan masyarakat negara tersebut.

Namun demikian Adam Smith menolak anggapan kaum merkantilisme ini. Pergulatan Adam Smith dengan sistem dominan saat itu, pada akhirnya membawanya pada perenungan yang melahirkan teori *Invisible Hand* (Tangan Gaib). Teori ini berangkat dari analisa sistem sebelumnya yang cenderung proteksionis terhadap individu-individu dalam mengembangkan modalnya.²³¹

Menurut teori ini : Setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menunjang kepentingan umum dengan perbuatannya itu, dan pula ia tidak tahu sampai seberapa jauhkah untuk kepentingannya itu. Ia berbuat itu hanyalah untuk

²³⁰ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²³¹ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

kepentingannya sendiri, hanya untuk keuntungan sendiri. Dan dalam hal ini ia dibimbing “tangan gaib” untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya.²³² Dengan mengejar kepentingan pribadi itu, ia akan mendorong kemajuan masyarakat dengan dorongan yang sering kali bahkan lebih efektif dari pada kalau ia sengaja melakukannya.

Melalui teorinya tersebut, Adam Smith mendorong pemerintahan pada saat itu untuk memberikan kebebasan individu dalam mengembangkan modal yang dimilikinya baik pada wilayah lokal maupun tansnasional. Adam Smith begitu yakin, bahwa kesejahteraan akan lahir manakala kebebasan individu itu terealisasikan. Kondisi demikian itu, bagi Adam Smith tidak tercipta dalam sistem merkantilisme dan fisiokrat yang cenderung proteksionis dan intervisionis terhadap individu-individu.²³³

Teori Invisible Hand ini, dalam perkembangannya menjadi kerangka dasar atas terciptanya mekanisme sistem pasar bebas.²³⁴ Doktrin pasar bebas yang dalam satu sisi seringkali orang menyandingkan dengan doktrin Laissez Faire menghendaki akan peran minimal dari negara atau pemerintah. Dalam istilah terkenal laissez faire diterjemahkan dengan “biarkanlah kami bebas berbuat” Istilah ini berasal dari fiksi Perancis yang digunakan pertama kali oleh para fisiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah atau negara dalam perdagangan.²³⁵

²³² A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²³³ Mark Skousen, Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media, 2005

²³⁴ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²³⁵ Winardi, Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi, Bandung: Transito, 1985

Seperti teori Invisible Hand Adam Smith, doktrin laissez faire berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (*centrally planned economy*).²³⁶

Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan.²³⁷

Oleh karena itu, peran negara dalam diktum Adam Smith yang tercermin dalam perekonomian pasar bebas ala kapitalisme terdiri atas tiga hal,²³⁸ yakni pertama negara mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Fungsi ini diorientasikan untuk menjaga kebebasan tiap individu yang tertuang dalam sistem pasar bebas yang didaulat sebagai sistem sosial masyarakat modern. Dengan kata lain kelestarian sistem ini, dibatasi akan intervensi pemerintah manakala terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam interaksi pasar bebas. Selain itu, untuk optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus juga bertindak

²³⁶ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²³⁷ Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996

²³⁸ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

adil. Dengan kata lain pemerintah tidak memihak kelompok manapun yang ada dalam masyarakat.

Dalam hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat :

1. Harus ada pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan di sini adalah bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
3. Terdapat jaminan akan berlangsungnya kekuasaan oposisi. Artinya dalam rangka untuk mengontrol kebijakan pemerintah, dibutuhkan sebuah kekuasaan di luar pemerintahan untuk menjamin dan mengawasi bahwa pemerintah akan senantiasa bertindak adil.

Fungsi yang kedua yakni pertahanan keamanan. Fungsi ini dimaksudkan negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dari serangan dan ancaman dari bangsa dan negara lain. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah menyediakan sarana dan prasarana publik. Dalam hal ini pembangunan sarana infrastuktur baik berkenaan dengan sistem pasar bebas maupun berkenaan dengan sarana publik seperti jalan dan yang lainnya adalah menjadi kewajiban pemerintah.

Melalui tiga fungsi dasar pemerintah atau negara tersebut, Adam Smith sebagai Fundhing Father sistem kapitalisme meyakini bahwa kesejahteraan akan dapat mudah terealisasi dari pada peran pemerintah yang jauh lebih dominan namun cenderung distorsif. Oleh karena itu, dengan bimbingan Invisible Hands (Tangan Gaib), sistem pasar bebas akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan

selama ini bagaimanakah cara untuk mendatangkan kesejahteraan.²³⁹

Dari kedua doktrin ini sistem pasar bebas menjadi tumpuan sistem perekonomian kapitalisme dalam mengembangkan kesejahteraan bagi warganya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Depresi Hebat (*The Great Depressions*) 1930

Tidak bisa dipungkiri bahwa mekanisme pasar bebas telah mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara. Fakta akan hal ini tercermin dalam perekonomian Amerika pada dekade 1800 an yang telah telah mencapai puncak perkembangannya sampai decade 1930an. Gilda-gilda kapitalisme dengan modal kakapnya bekerja dengan luar biasa.²⁴⁰

Produksi barang-barang menjadi berlipat ganda sebagaimana yang diprediksikan oleh Adam Smith sebelumnya. Akumulasi modal semakin besar yang akhirnya berkembang pada satu titik yang tidak bisa terbendung lagi. Dalam kondisi demikian, kapitalisme berfikir untuk memperluas pangsa pasar produksinya dalam rangka mengembangkan modalnya. Dari sini, motif memperoleh laba

²³⁹ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²⁴⁰ M. Umer Chapra mengupas dan mengkritisi secara mendalam dan ilmiah tentang sistem kapitalisme yang telah gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia. Lihat Islam and the Economic Challenge, International Institute of Islamic Thought, USA, 1992.

dan keuntungan yang lebih besar pada akhirnya melahirkan gerakan yang dikenal dengan kolonialisme.²⁴¹

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi demikian, ketika pasar tidak lagi mampu menyerap hasil produksi, maka perekonomian Amerika diguncang oleh depresi hebat pada dekade 1930 an.²⁴² Peristiwa ini terkenal dengan Malaise atau The Great Depretions. Peristiwa ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat sehingga dengan lemahnya daya beli masyarakat hasil-hasil produksi tidak terserap oleh pasar.²⁴³ Dalam kondisi demikian, muncul seorang ekonom yang mencoba menjelaskan depresi tersebut.

Adalah Jhon Maynard Keynes²⁴⁴ (1883-1946) pada tahun 1936, melalui karya monumentalnya *The General Theory of Employment Interest and Money*, mengenalkan konsep dan istilah yang ditujukan untuk membantu menjelaskan Depresi Hebat. Satu pendapat untuk kebijakan ekonomi *laissez-faire* selama resesi ialah jika konsumsi jatuh, maka rasio bunga akan jatuh juga. Tingkat bunga yang lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan investasi dan permintaan akan tetap konstan. Keynes percaya kalau terdapat alasan kenapa investasi tidak selamanya secara otomatis naik sebagai reaksi atas jatuhnya konsumsi. Bisnis membuat investasi berdasar pada ekspektasi atas adanya keuntungan.

²⁴¹ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, Bandung, Remaja Karya, 1986, hlm. 38

²⁴² Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, Bandung, Remaja Karya, 1986, hlm. 38

²⁴³ A. Sony Keraf, *Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²⁴⁴ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, Bandung, Remaja Karya, 1986, hlm. 38

Menurut Keynes, jika jatuhnya konsumsi muncul pada waktu lama, maka bisnis akan menunjukkan tren penurunan harapan dari penjualan masa depan. Oleh karena itu, menurut Keynes hal terakhir yang kapitalis pikir menarik ialah berinvestasi dalam meningkatkan produksi di masa depan, bahkan apabila bunga lebih rendah maka modal tidak menjadi mahal. Dalam kondisi demikian peningkatan produksi sampai pada titik yang ekstrim sehingga terjadilah kejatuhan umum atau Depresi Hebat.²⁴⁵

Solusi dari masalah ini, menurut Keynes, untuk melepaskan ketidakstabilan pasar adalah melalui intervensi pemerintah.²⁴⁶ Dalam pandangan ini, karena aktor swasta tidak bisa diandalkan untuk membuat permintaan agregat selama resesi, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat permintaan. Sejak saat itulah perekonomian Amerika sedikit demi sedikit terpulihkan. Sementara itu, Keynes dengan karyanya terkenal dengan teori kebijakan moneter dan fiskal yang menjadi domain disiplin makro ekonomi.

Ketimpangan Dalam Sistem Pasar Bebas

Globalisasi kekuatan pasar bebas yang selama ini getol dikampanyekan oleh bank dunia dan IMF dalam kenyataannya telah menciptakan ketimpangan yang makin besar. Salah satu ketimpangan yang terjadi adalah tidak proporsionalnya penguasaan sumber daya alam produktif yang ada. Dari catatan

²⁴⁵ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²⁴⁶ M. Umer Chapra mengupas dan mengkritisi secara mendalam dan ilmiah tentang sistem kapitalisme yang telah gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia. Lihat *Islam and the Economic Challenge*, International Institute of Islamic Thought, USA, 1992.

UNDP dinyatakan bahwa kaum kaya dunia sebanyak 20% telah menikmati 86% kekayaan dunia, sedangkan 80% kaum miskin dan menengah dunia menikmati sekitar 14% seluruh kekayaan dunia. Ketimpangan tersebut dalam catatan Kevin Danaher jauh lebih ekstrim dari pada akhir Perang Dunia II sebelum IMF dan Bank Dunia berdiri.²⁴⁷

Ketimpangan yang sangat besar tersebut mengakibatkan tingginya tingkat kematian bagi anak-anak. Malnutrisi dan kelaparan menjadi pemandangan yang tidak asing lagi, sementara sekelompok orang kaya berjibakau dengan gelimang harta dari mekanisme pasar bebas. Derita jutaan orang tersebut adalah akibat dari terkondisikannya seluruh barang dan jasa dalam ekonomi global melalui mekanisme pasar.

Semua orang akan paham bahwa mekanisme pasar digerakkan oleh kekuatan modal atau uang melalui mekanisme permintaan (*Demand*) dan penawaran (*Supply*). Oleh karena itu, adalah wajar manakala kekayaan hanya berputar pada sekelompok kecil masyarakat kaya saja, sementara kelompok mayoritas yang notabene golongan miskin dan menengah hanya bisa pasrah terhadap nasibnya.²⁴⁸

Pertumbuhan ekonomi yang lahir dari mekanisme pasar bebas adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun fakta ketimpangan sosial dan jurang ketidakadilan dalam masyarakat juga tidak bisa dipungkiri sebagai konsekwensi logis mekanisme pasar bebas. Kuncinya adalah bahwa apa yang dikatakan Adam Smith dengan kesejahteraan yang otomatis lahir dari pergerakan individu melalui bimbingan Invisible

²⁴⁷ Kevin Danaher, 10 Reason Abolish IMF And World Bank, terj. AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelarar, 2005

²⁴⁸ Kevin Danaher, 10 Reason Abolish IMF And World Bank, terj. AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelarar, 2005

Hand nyata-nyata dewasa ini makin tidak menunjukkan relevansinya.²⁴⁹

Jika pertumbuhan ekonomi adalah fakta yang nyata sebagai akibat mekanisme pasar bebas, lalu mengapa kesenjangan masih ada bahkan menunjukkan tren peningkatan. Mungkin pertanyaan ini adalah sering kali muncul dalam benak kita. Pada intinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam GNP tidak selamanya menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Sebab instrument pertumbuhan ekonomi yang didengung-dengungkan lewat indikator GNP memiliki kelemahan.

Beberapa kelemahan tersebut adalah Pertama instrumen GNP tidak dapat memotret tingkat ketimpangan antar sektor perekonomian, kedua GNP adalah indikator makro ekonomi yang di ukur secara agregatif (menyeluruh). Oleh karena itu, adalah sangat tidak relevan manakala melalui indikator GNP yang meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga relatif meningkat.²⁵⁰

Dalam konteks Indonesia, dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % per tahun pada tahun 1997, menurut data BPS menunjukkan 97,5% aset nasional di miliki oleh 2,5% bisnis konglomerat, sedangkan 2,5% aset nasional dimiliki oleh kelompok ekonomi kecil menengah yang jumlahnya mencapai 97,5% dari keseluruhan dunia usaha. Selain itu, Indonesia yang terkenal sebagai negara makmur dengan kekayaan yang melimpah ruah justru dihadapkan dengan fakta yang mencengangkan bahwa jumlah penduduk miskin relatif

²⁴⁹ A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²⁵⁰ Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro, Jakarta: PT.. Raja Grafindo, 1996

tinggi yakni sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58% pada tahun 2007.

Betapa hal ini adalah fakta yang terhampar dihadapan kita bahwa distribusi pendapatan dengan menggunakan mekanisme pasar bebas hanya akan melahirkan ketimpangan sosial belaka. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi oleh pemerataan ekonomi adalah fakta realitas sosial yang inheren dalam mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, bersandar kepada kekuatan pasar bebas sebagai tonggak perekonomian adalah sama artinya dengan menjerumuskan milyaran orang ke dalam lembah penderitaan dan ketidakadilan. Minimnya cerita sukses yang di barengi oleh minimnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari mekanisme pasar bebas, adalah alasan yang cukup rasional untuk menelaah dan mempertanyakan kembali gagasan pasar bebas sebagai piranti sistem ekonomi modern dalam mendistribusikan barang dan jasa (pendapatan).²⁵¹

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal ini, selain sebagai ajaran normatif (hubungan vertikal), Islam juga berfungsi sebagai pandangan hidup (*World View*) bagi segenap para penganutnya (hubungan horizontal).²⁵²

Dalam konteks mekanisme pasar, Islam memiliki seperangkat aturan yang termaktum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Aturan-aturan tersebut, dalam perkembangan sejarah

²⁵¹ Arief Ramelan Karseno, Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, ed. Dr. Mohtar Mas'ood, Yogyakarta: UII Press, 1999

²⁵² M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

terbreakdown oleh sarjana-sarjana muslim. Salah satu tokoh pemikir Islam yang menaruh perhatian besar dalam permasalahan mekanisme pasar pada khususnya dan permasalahan ekonomi pada umumnya adalah Ibn Taimiyah.

Menurut Ibn Taimiyah,²⁵³ mekanisme pasar sebebapapun pada dasarnya tidak selalu mendatangkan kemadlorotan bagi umat manusia. Selama mekanisme pasar berjalan secara alamiah tanpa ada proses rekayasa dari komponen yang berwenang yang dalam hal ini adalah produsen dan konsumen, maka segala bentuk dinamika yang terdapat didalam mekanisme pasar bisa dibenarkan.

Bagi Ibn Taimiyah, mekanisme pasar yang erat kaitannya dengan permasalahan harga, pada dasarnya terbentuk oleh mekanisme permintaan (demand) dan penawaran (Suply).²⁵⁴ Oleh karena itu, naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Ada kalanya harga suatu barang naik disebabkan oleh faktor menurunnya produksi karena kemampuan perusahaan dan menurunnya impor. Keduanya (menurunnya produksi dan impor) memang berjalan dalam kapasitas yang maksimal dan tanpa adanya upaya untuk mengeruk keuntungan. Dalam kondisi demikian, Ibn Taimiyah berpendapat kenaikan harga tersebut adalah dibenarkan.

Dalam kondisi yang lain, harga juga bisa menurun manakala jumlah stok barang produksi melimpah sedangkan jumlah permintaannya menurun. Kelangkaan dan melimpahnya barang di pasar bagi Ibn Taimiyah tidak

²⁵³ AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

²⁵⁴ AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

selamanya merupakan hasil dari rekayasa dari seseorang. Dalam hal ini, untuk menjaga mekanisme pasar berjalan secara alamiah maka dua komponen penting yang harus di penuhi adalah berkaitan dengan ketersediaan produksi lokal dan produksi transnasional (impor).²⁵⁵

Sementara itu, beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi terhadap permintaan dan konsekwensinya terhadap fluktuasi harga, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal, antara lain :²⁵⁶

1. Keinginan masyarakat terhadap satu jenis barang yang berbeda dan sesekali mengalami perubahan.
2. Harga akan naik jika jumlah permintaan terhadap satu barang juga naik.
3. Harga juga ditentukan oleh transaksi yang berlangsung. Satu waktu harga akan naik manakala transaksi terjadi antar produsen dengan konsumen yang sedang memiliki hutang pada produsen. Sebaliknya hara bisa jatuh lebih tinggi manakala transaksi terjadi antara produsen dan konsumen yang dianggap memiliki track recoard yang bagus. (kasus individual).

Ketiga komponen tersebut merupakan beberapa faktor yang sering kali mempengaruhi dinamika harga suatu komoditas dalam pasar. Di sisi lain, variabel yang amat penting dalam menjaga dinamika mekanisme pasar agar berjalan secara alamiah dan manakala terjadi struktur pasar yang distorsif

²⁵⁵ AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

²⁵⁶ AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

maka ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Variabel tersebut adalah sebagai berikut :²⁵⁷

a. Peran pemerintah

Dalam konsepsi Islam, negara memiliki kewenangan yang bersifat mutlak adanya, sebab dengan kewenangan tersebut keberadaan masyarakat/rakyat akan terayomi. Kewenangan pokok tersebut adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Need) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Dua hal tersebut bersifat sangat vundamental, artinya manakala tidak terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemadloratan akan menimpa masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan dasar (Basic Need) dan kehidupan spiritual masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dilakukan sebuah negara.

Adapun dalam bidang ekonomi negara mempunyai beberapa peranan antara lain :²⁵⁸

1. Memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
2. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang.
3. Menjaga hukum dan Ketertiban
4. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi
5. Mengatur keamanan masyarakat serta membagi pemerataan pendapatan dan kekayaan

²⁵⁷ M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

²⁵⁸ Arief Ramelan Karseno, Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, ed. Dr. Mohtar Mas' oed, Yogyakarta: UII Press, 1999

6. Menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.

Dengan tingkat kewenangan negara yang sedemikian rupa tersebut, maka distorsi pasar yang memiliki kecenderungan untuk mengeruk keuntungan (mengeksplorasi) dari pihak lain, akan dapat terminimalisasi. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan konsepsi peran negara prospektif kapitalisme. Oleh sebab itu, wajar manakala dalam mekanisme pasar kapitalisme memiliki kecenderungan eksploitatif.

b. Regulasi Harga

Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Ia lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo’a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik”.²⁵⁹

Dari riwayat tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penetapan harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasul. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan.

²⁵⁹ AA. Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997

Bagi penulis, Hadist di atas dilatar belakangi oleh kondisi harga yang dalam prespektif Rasul masih bisa di jangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan baru dalam kehidupan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada masa Rasul seperti digambarkan di atas, para sarjana muslim merumuskan bahwa harga dalam kondisi tertentu bisa dilakukan stabilisasi. Adapun institusi yang memiliki kewenangan adalah pemerintah atau negara.

Beberapa pokok pemikiran sarjana muslim yang berkaitan dengan pengawasan harga antara lain :²⁶⁰

1. Tidak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari pada harga yang semestinya (mekanisme Demand dan Suply).
2. Dalam kondisi apapun penetapan harga adalah bertentangan dengan keadilan dan kejujuran.
3. Pengaturan harga selalu diperbolehkan
4. Penetapan harga diperbolehkan apabila dalam kondisi yang darurat. Artinya daya beli masyarakat benar-benar tidak mampu menjangkau harga komoditas yang ada.

Di sisi lain, untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan suatu strategi yang holistik. Strategi ini

²⁶⁰ Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

meliputi reorganisasi seluruh sistem ekonomi dengan empat unsur penting yang saling mendukung, yaitu:

1. Suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan Khilafah dan al-Adl.
2. Suatu sistem motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban kepada Tuhan dan Hari Akhir.
3. Restrukturisasi seluruh sistem ekonomi, dengan tujuan mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka dengan dasar lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber prestise.
4. Suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.²⁶¹

Pasar bebas yang sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat, dalam satu kondisi tidak selalu mendatangkan keburukan bagi umat manusia seperti yang tergambar dalam paradigma sistem kapitalisme. Ketimpangan dan keburukan yang muncul dari mekanisme pasar bebas pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut antara lain berkenaan dengan kewenangan pemerintah dan regulasi dalam sistem

²⁶¹ M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 1997

perekonomian.²⁶² Minimnya peran pemerintah dalam sistem kapitalisme *laissez faire* telah menggiring pada proses ketimpangan sosial yang membahayakan relasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah yang minim dalam pandangan Islam sangat tidak dibenarkan, sebab akan memicu distorsi mekanisme pasar.

Kecenderungan pasar untuk mengumpulkan keuntungan, haruslah di batasi dengan mekanisme filter yang bersumber pada ajaran agama. Dalam hal ini, Islam menawarkan mekanisme filter yang berbasis pada nilai moral yang tertuang dalam prinsip pokok sistem ekonomi Islam yakni Tauhid, Khilafah dan al-Adl.²⁶³

Dengan kewenangan pemerintah dan regulasi kebijakan ekonomi yang jelas, maka distorsi pasar yang pernah terjadi dalam sistem pasar bebas prespektif kapitalisme akan seminimal mungkin dapat tereduksi yang pada akhirnya kesejahteraan akan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

²⁶² A. Sony Keraf, Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9, September 1995

²⁶³ M. Umar Chapra, Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam "Etika Ekonomi Politik", ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti, 199

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, 1995, *“Teori dan Praktek Ekonomi Islam,*
Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Sya’as, t.t “Sunan Abi Dawud,
Daru al-fkr, jilid III .
- _____ 1998 “Kurikulum dan Silabi Ekonomi Islam,
Yogyakarta: LP3EI-UII.
- _____ 2003 “Kajian Ekonomi Islam Kontemporer, TIII,
Jakarta, Ad-Darimy
- _____ t.t “Sunan Ad-Darimy, Darul Fikri Beirut
- Afzalur Rahman, 1995 “Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: Dana
Baku Wakaf,
- Ahmad Syaf’i, 1998 “Islam dan Polttik; Upaya Membingkai
Peradaban. Cirebon: Pustaka DINAMIKA
- Ahmad M. Saefuddin, 1987 “Ilmu Ekonomi dan Masyarakat
dalam Perspektif Islam, Jakarta: Rajawali Press,
- A.Islahi, 1997 “Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah, terj. Anshari
Thayyib”, Bina Ilmu Surabaya,
- A.M. Saefuddin, 1984 “Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi
Islam, Jakarta: Media Dakwah,
- A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, 1999 “Hukum Ekonomi
Islam”, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Aminore Fanfaru, 1938 “Catholicism, Peotestantism and
Capitalism, Sheed and Ward, London;
- Al-Ghazali, t.t “Ihya Ulumuddin, Jilid III,
- Al-Ghazali, t.t “Ihya Ulumuddin , Jilid IV,
- Arifin B. dan Didik J Rachbini, 2001 “Ekonomi Politik dan
Kebijakan Publik, Pustaka Grasindo, Jakarta,.

- Arief Ramelan Karseno, 1999 "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pasar, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan, ed. Dr. Mohtar Mas'ood, Yogyakarta: UII Press
- Ardi Djaja. 2012 "*Sistem Ekonomi Campuran*. <http://ardcerdasnet.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-campuran.html>
- A.Sony Keraf, 1995 "Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Jurnal Prisma, Vol. 9,
- Canya Pramesthi. 2013. "*Macam- Macam Sistem Ekonomi*. <http://canyapramesthirm.blogspot.com/2013/04/macam-macam-sistem-ekonomi.html>
- Didick J.Rachbini, 2002 "Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik". Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Donald Rothchild dan Robert L Curry, 1989 "Scarcity, Choice, and Public Policy in Middle Africa, University of California Press, Berkeley.
- Dumairy, 2013 "perekonomian Indonesia", Penerbit Erlangga, Jakarta
- Deni Aulia. 2013, "*System Ekonomi Campuran*. <http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system-ekonomi-campuran.html>
- Edi Suharto, 2008 "Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, dalam http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm/12-05-2008/09:47

- Franz Magnis Suseno, 2003 “Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme”, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,
- Grace Banne Pabutungan. 2012 “*Sistem Ekonomi Pasar/Liberal dan Sistem Ekonomi Campuran*.” <http://gracebannepabutungan.wordpress.com/2012/03/30/sistem-ekonomi-pasarliberal-dan-sistem-ekonomi-campuran/>
- Gede Pradnyan, 2012 “*SISTEM EKONOMI TRADISIONAL*”. <http://gedeprad.blogspot.com/2012/08/sistem-ekonomi-tradisional.html>
- Gunar Myrdal, 1957 “Economic Theory and Under Developed Regions, Gerald Duckworth, London, .
- Hendro Basuki, 1993 “Ekonomi Amerika dalam Pembinaan, Suara Merdeka, No. XLI/14/VI/24 Februari .
- Hillary Clinton, 1996 “It Takes a Village, Alih bahasa Widodo, Jakarta: Gramedia Pustaka, Cet. 1.
- Husein Sawit, “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; perlukah berbeda.
- Imamudin Yuliadi, 1999 “Metodologi Ekonomi Islam; Utiktas, (No.9. Tahun ke-7)
- Ibnu Tamiyah, t.t, Al-Hisbah fil Islam, Kairo, Mesir,
- Ibnu Taymiyah, t.t “Majmu’ Fatawa , XXIX
- Ibn Taimiyah, 1387 “Majmu’ al-Fatawa Ahmad bin Taimiyah vol 29”, Riyadh.
- Ibnu Khaldun, 2000 “Muqaddimah, Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Ikhwan Hamdani, 2003 “Sistem Pasar, Nurinsani, Jakarta.
- Ibnu Qudamah, 1988, “Al-Mughni, Darul Fikri, Beirut

- Josephine. 2013 “Sistem Perekonomian Di Dunia.
<http://josephinejoe.wordpress.com/2013/03/13/sistem-perekonomian-di-dunia/>
- James Harvei Dood, C.W. Hasek, 1948, *Ekonomi Principles and Application*, Soudi Wastern, (New York; Publishing Commpany).
- J. Barkley Rosse, Jr. Marina V. Rosser, *Comparative Economics in a Transforming World Economy*
- Kevin Danaher, 2005 “10 Reason Abolish IMF And World Bank, terj. AB. Widyanta, Yogyakarta: Pustaka Cindelaras
- Lane, Jane Erik et al, 1994 “ekonomi Politik Komparatif”, terj, Jakarta; Raja grafindo Persada.
- Lester Thurow, 1996 “The Future of Capitalism, London: Nicholas Bearley Publishing
- Martin Staniland, 2003 “Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Politik Kelatarbelakangan”, Terj, Jakarta. Rajawali
- Marshal Green, 1997 “The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri)
- Mark Skousen, 2005 “Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenanda Media
- Mubyarto, 2000 “Membangun Sistem Ekonomi (Yogyakarta: BPFE)
- Mubiyarto, 1981 “Moral Ekonomi Pancasila, Prosma, 1 Januari 1981, Jakarta
- Max Weber, 1958 “*The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York;.

- M. Dawam Raahardjo (Ed), 1987 “Kapitalisme Dulu dan Sekarang, Jakarta: LP3ES,
- M.Dawam Rahardjo. 2009 “*Menuju Sistem Perekonomian Indonesia*. Jurnal UNISIA.Vol. XXXII (72).
- M. Dawam Rahardjo, 1999 “Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, cet. 1.
- M. Nejatullah Siddiqi, 1986 “Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddtn, Jakarta: Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat,
- Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy 1964, *Economic Thought of Abu Yusuf*, Aligarh, In Fikri wa Najjar, vol. 5 No 1, Januari
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, t.t “The Economic Enterprise in Islam, Islamic Publication, ltd, Lahore, terj. Anas Sidik, Bumi Aksara Jakarta.
- M. Amin Rais, 1989 “Cakraivala Islam; Antar Cita dan Fakta, Bandung
- Munrahim Misanam, MA., Ec, P.hD, 1999 “Kuliah Filsafat Ekonomi Islam, pada tanggal 8-10-1999.
- Munrokhim Misanam, 1998 “Pendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, Surakarta: 17 Mei
- Munrahim Misanam, 1998 “Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep Ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi, Yogyakarta: 1998.

- Meri Herliyani. 2009 “*Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. 2009. Vol. 6 (2)
- Mohamed Aslam Mohamed Haneef, 1997 “Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economies, Malaysia, HUM (Journal of Economies & Management 5, No. 1), International Islamic University Malaysia Press,
- Muhammad Akhyar Adnan, 1999 “Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri., Kabar Kampus, 29 Desember 1999.
- Muhammad Syauqi Al-Fanjari, 1988, Ekonomi Islam Masa Kini, Bandung: Mizan, 1988, penerjemah Husaini
- M. Umar Chapra, 1997 “Negara Sejahtera dalam Islam Dan Peranannya Di bidang Ekonomi dalam “Etika Ekonomi Politik”, ed. Ainur R. Shopian, Surabaya: Risalah Gusti,
- N. Gregory Mankiw, 2006 “Pengantar Ekonomi Makro (Jakarta: Salemba Empat)
- Oskar Lange dan Fred M. Taylor, 1964, “Teori Ekonomi Sosialisme, Minnesota, USA, 1938, diterjemahkan oleh Drs. Paul Sitohang, Jakarta: Bharata.
- Peter L. Berger, 1986, The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout prosperity, Equality and Uberty, United States of America.
- Robert W. Green, t.t, “Protestantism and Capitalism, The Weber Thesis and His Critics, D.C. Heat and Cimpany, New York,.
- Rich Devos, 1995 “Compassionate Capitalism, (Kapitalisme dengan Kepedulian Sosial), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Ruslan Abdul Gani, 1997, "Harian Merdeka, 28 Februari 1997.
- Scott, John Industrialism, 2005, "A Dictionary of Sociology. Oxford University Press.
- Sri-Edi Swasono, 2010 "Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar bebas, Pusat Studi Ekonomi Panxasila-UGM.
- Steven Pressman, 2000 "Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, Alih Bahasa
- Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shaikh Mahmud Ahmad, 1947 "*Economic of Islam*, Comparative Study, Edisi 1, Lahore, Pakistan: Ashraf Press.
- Syed Nawawi Baqir Naqivi, 1985 "Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami, Alih Bahasa Husin Anis, Bandung Mizan.
- Peter L. Berger, 1986, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition about prosperity, Equality and Uberty*, United States of America.
- S.M. Hasanuzzaman, 2004, "Definition of Islamic Economics, *Jutnai of Research in Islamic Economics*, vol. 1, No.2
- Surahwardi Lubis, 2000 "Hukum Ekonomi Islam" Sinar Grafika Jakarta
- Suherman Rosyidi, 2001, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro Dan Mikro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, edisi 2, cet. IX, h. 950.
- Vina Shafa. 2013 "*NEGARA-NEGARA YANG MENGANUT SISTEM EKONOMI CAMPURAN, LIBERAL,*

- TERPUSAT DAN TRADISIONAL.*
- <http://vinashafa.blogspot.com/2013/05/negara-negara-yang-menganut-sistem.html>
- Winardi, 1986, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, Bandung, Remaja Karya,
- Winardi, 1985 “Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi, Bandung: Transito,
- Wijoyo Nitusastro, 1959, *“The Socio-Economic Basis of the Indonesian State”*, 1959
- Wiliam Eberstein, Edwin Focelma dan Alex Jemadu, (dkk), 1994, *Isme-isme Dewasalni*, Edisi IX, , Alih Bahasa Alex Jemadu Jakarta: Erlangga Press.
- Warner Sombart, 2000, “Capitalism”, dimuat dalam *Encyclopedia of the Social Science*, voi. 3-4, h. 196.
- Wikipedia, 2014 “Sistem Perekonomian”. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
- Yusuf Qardlahi, 1997, “Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Penerjemah; Zainal Arifn,
- Zimbakst Andres, Howard J. Sherm, 1989 “Economics Syystem a Political-Economic Opproach, 2 Edisi, Stuart Brown Comparison Harcourt Broce Javanovindi Sandiago.
- Zainal Abidin Ahmad, 1979, “Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

PROFIL PENULIS



Dr. Nihayatul Masykuroh, M.Si lahir di Serang pada 12 Februari 1964, anak ke 3 dari 8 bersaudara dari pasangan Prof. DR. H.M. Junis Gozali dan Hj. Mamduchah Arifudin.

Ia menempuh pendidikan formalnya pada SDN 2 Cilegon (tamat 1975-1976), melanjutkan ke tingkat SLTP Negeri 1 Cilegon (tamat 1978-1979), lalu ke SLTA Negeri 1 Serang (tamat 1983-1984), kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung jurusan Perdata Islam hingga meraih Sarjana Lengkap (tamat 1989-1990), kemudian meraih gelar Magister dari Universitas Islam Indonesia (UII) di bidang Ekonomi Islam (tamat 2005-2006), dan telah menyelesaikan pendidikan program Doktor (S3) pada Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2012.

Karirnya dimulai sebagai asisten dosen dan staf Subag Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" Serang cabang Bandung (1990-1993), kemudian sebagai dosen dan ketua Program Studi Tafsir Hadis pada Fakultas Ushhuluddin STAIN SMH Banten (2000-2003), Ketua Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2003-2005), Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten (2005-2010). Ketua Prodi Pasca Sarjana UIN SMH Banten (2012-2014),

Dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN “SMH” Banten (2015-sekarang).

Istri dari seorang dokter dan ibu dari 2 puteri ini selain tugas utamanya sebagai dosen juga aktif dalam kepengurusan berbagai organisasi antara lain: pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAIEI) Provinsi Banten, pengurus PUSKUM0HAM, pengurus Pusat Studi Wanita (PSW) dan ketua Jurnal al-Fath.

Karya tulis yang pernah dibuat antara lain: "Peran Wanita Islam dalam Bidang Politik (Studi Kuota 30% wanita di legislatif), Sistem Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Alternatif (Jurnal al-Qolam), Kontribusi Organisasi Wanita Muslimat, Aisyah dan Persisteri dalam Pembinaan Umat (penelitian), Wanita dan Peran Politik dalam Perspektif Islam (penelitian), Islam di Singapura (studi Peran MVIS dalam Pembinaan Umat Islam Singapura (penelitian).